

EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA GUNA

MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT

(Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Tanjungrejo Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

ANANDHIKA MEGA PRATAMA

NIM. 0910320200



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

MALANG

2014

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Februari 2014
 Jam : 13.00 WIB
 Judul : Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang)
 Disusun oleh : Anandhika Mega Pratama
 NIM : 0910320200

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
 NIP 19550902 198202 2 001

Anggota



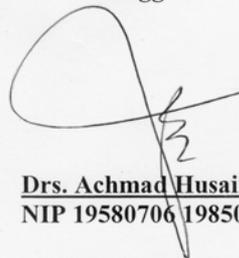
Dra. Zahroh ZA, M.Si
 NIP 19591202 198403 2 001

Anggota



Dra. Maria Goretii Wi Endang NP, M.Si
 NIP 19620422 198701 2 001

Anggota



Drs. Achmad Husaini M.AB
 NIP 19580706 198503 1 004



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Januari 2014

Mahasiswa



Nama : Anandhika Mega Pratama

NIM : 0910320200

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA
GUNA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT (Studi pada PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota
Malang

Disusun oleh : Anandhika Mega Pratama

NIM : 0910320200

Fakultas : Ilmu Administrasi

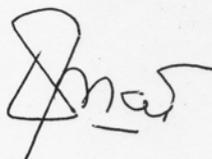
Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 22 Januari 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr Sri Mangesti, M.Si
NIP. 195509021982022001

Anggota



Dra. Zahroh ZA, M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

RINGKASAN

Anandhika Mega Pratama, 2014, **Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang)**, Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, Dra. Zahroh ZA, M.Si. 108 hal

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang merupakan bank milik pemerintah yang tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil dalam membantu masalah permodalan guna meningkatkan taraf hidup agar dapat lebih baik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang memiliki berbagai fasilitas dan serta menawarkan berbagai jenis produk dan jasa keuangan lainnya, salah satunya menawarkan fasilitas kredit bagi nasabahnya. Salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan adalah kredit modal kerja. Dalam pemerian kredit modal kerja seringkali menghadapi resiko berupa kredit bermasalah yang dapat berakibat pada terjadinya tunggakan kredit, oleh karena itu pengawasan kredit yang diperlukan untuk menekan tunggakan kredit.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pengawasan kredit modal kerja dilihat dari teknik pengawasan kredit serta analisis tunggakan kredit modal kerja selama 3 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan kredit yang disalurkan.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan kredit telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan kredit namun tingkat Non Performing Loan setiap tahun meningkat meskipun tetap dibawah standard Bank Indonesia sebesar 5% yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,86%, di tahun 2011 meningkat menjadi 3,05% kemudian di tahun 2012 meningkat kembali menjadi 3,75%. Ditemukan beberapa kelemahan yang menyebabkan hal tersebut yaitu kegiatan inspeksi On The Spot yang hanya dilakukan saat nasabah mulai menunggak, Account Officer yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah nasabah, serta kegiatan pembinaan nasabah yang perlu dilakukan lebih sering.

Terhadap kelemahan – kelemahan yang ditemukan, disarankan penambahan tenaga Account Officer yang didukung oleh ketrampilan yang kompeten serta peningkatan frekuensi kunjungan terhadap nasabah sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dan pihak nasabah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan YME atas anugerah dan kasihnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA, selaku sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Sri Mangesti, M.Si selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran – saran yang berguna bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Zahroh ZA, M.Si selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran – saran yang berguna bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mochamad Nasir, selaku Kepala unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untk melakukan penelitian.
7. Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungerjo Kota Malang yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

8. Orang Tua dan keluarga tercinta yang telah memberi dukungan, spirit, dan doa tiada henti.
9. Kelompok Secondfamz (Chikita, Bergita, Femia, Ocha, Alex, Alfin, Reza) bersama kalian selama 4 tahun adalah kenangan yang terlupakan, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka ataupun duka.
10. Teman – teman seperjuangan kita bersama membangun semangat yang kadang memudar.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, Januari 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teori Perbankan.....	11
1. Pengertian Bank.....	11
2. Fungsi Bank.....	12
3. Jenis Bank.....	14
B. Kredit.....	15
1. Pengertian Kredit.....	15
2. Unsur - Unsur Kredit	17
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	18
4. Jenis - Jenis Kredit.....	18
5. Kredit Modal Kerja.....	21
6. Prinsip Penilaian Kredit.....	23
7. Prosedur Umum Kredit.....	26
C. Pengawasan Kredit	28
1. Pengertian Pengawasan Kredit	28
2. Tujuan Pengawasan Kredit	30
3. Fungsi Pengawasan Kredit.....	31

4. Macam - Macam Pengawasan Kredit.....	32
5. Kolektabilitas Kredit	33
D. Teknik Pengawasan Kredit	35
E. Aspek - Aspek Pengawasan Kredit	38
F. Tunggakan Kredit.....	39
1. Pengertian Tunggakan Kredit.....	40
2. Perhitungan Tunggakan Kredit.....	40
3. Penyebab dan Pencegahan Tunggakan Kredit	40
4. Tindakan Penyelamatan Kredit	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Variabel Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Perusahaan	49
1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	49
2. Visi dan Misi	51
3. Produk dan Jasa Pelayanan PT Bank Rakyat Indonesia	52
4. Struktur Organisasi	55
B. Penyajian Data	
1. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT BRI Cabang Tanjungrejo.....	62
2. Pengawasan Kredit Modal Kerja	68
3. Tunggakan Kredit	79
C. Analisis dan Interpretasi Data	93
1. Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja	93
2. Analisis Tunggakan Kredit Modal Kerja	96
BAB V KESIMPULAN	105
1. Kesimpulan	105
2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

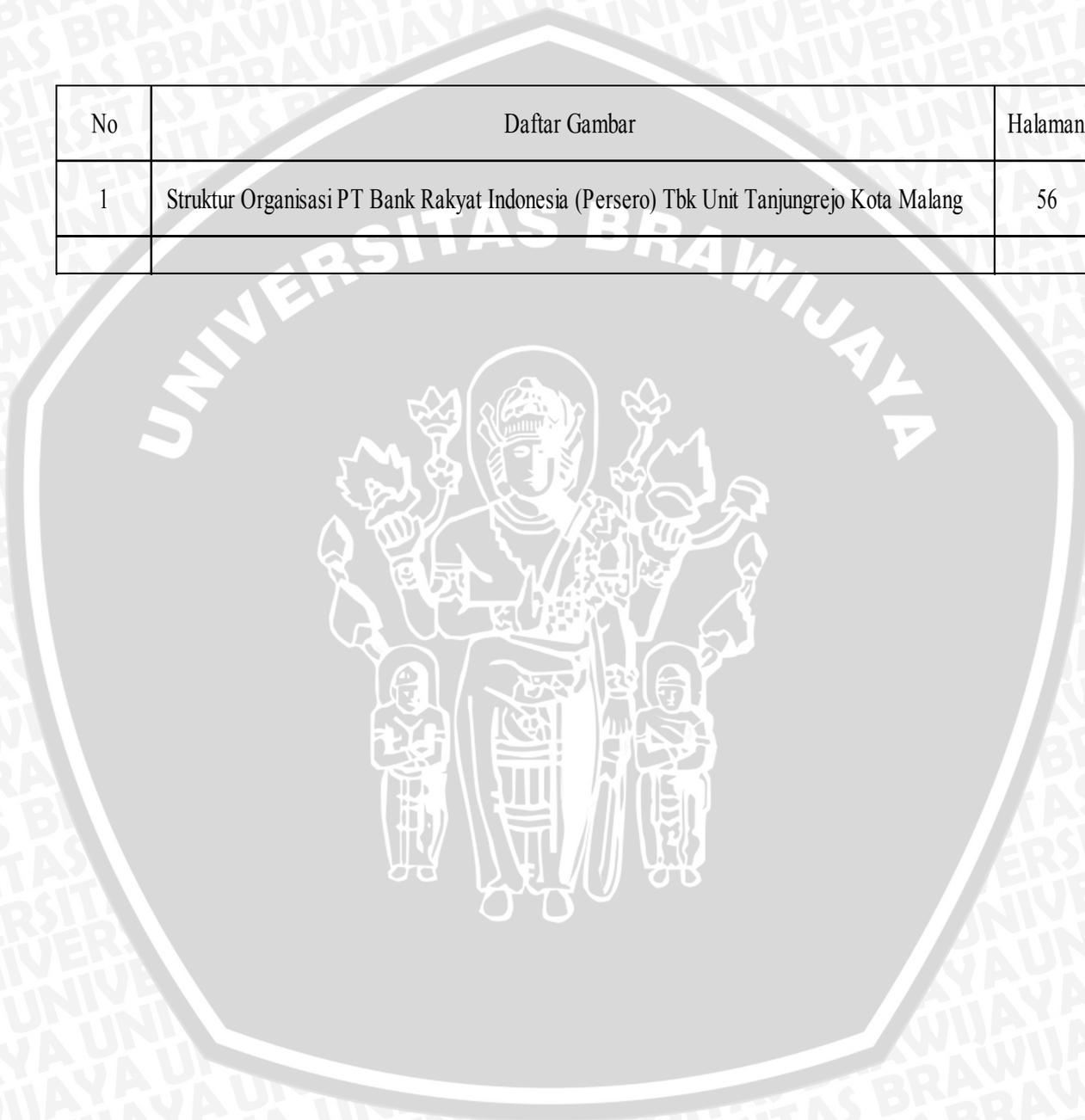


DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Kredit Modal Kerja dan Tunggakan Kredit Modal Kerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2012	5
2	Kolektabilitas Kredit Modal Kerja periode berakhir 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012	80
3	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja Periode yang berakhir 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012	83
4	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan periode yang berakhir Desember 2010	86
5	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan periode yang berakhir Desember 2011	88
6	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan periode yang berakhir Desember 2012	91
7	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Modal Kerja yang disalurkan tahun 2010 s/d tahun 2012	96
8	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) periode yang berakhir pada 31 Desember 2010	97
9	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) periode yang berakhir pada 31 Desember 2011	98
10	Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) periode yang berakhir pada 31 Desember 2012	99
11	Perbandingan Persentase Kredit Modal Kerja (KMK) Tahun 2010 s/d Tahun 2012	100

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1	Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang	56



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Permohonan KUR	-
2	Surat Keterangan Usaha	-
3	Surat Pernyataan Sporadis	-
4	Kutipan Letter C	-
5	Surat Keterangan Tanah	-
6	Surat Keterangan Penelitian	-

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Berbagai macam strategi dan kebijakan digunakan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang. Dalam menjalankan strategi dan kebijakan tersebut, diperlukan modal yang cukup banyak. Modal merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang tercapainya eksistensi kegiatan usaha. Apabila suatu usaha berkembang semakin besar, maka modal yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam meningkatkan produktivitas kerja dan modal dari suatu usaha, perbankan mempunyai peranan penting dalam rangka mengatasi problema kebutuhan modal usaha, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu perbankan dan pengusaha. Ada berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan modal, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam dana kepada pihak bank.

Peran perbankan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara sangat besar. Hal ini dikarenakan semua transaksi keuangan menggunakan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga, tidak dapat dilepaskan dari dunia

perbankan. Terdapat suatu anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital, misalnya dalam hal pencetakan uang, mengedarkan uang, menyediakan modal untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang secara aman, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2006:2).

Peranan bank sebagai lembaga keuangan selalu dikaitkan dengan masalah kredit. Sesuai dengan pengertian bank dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu “ Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama bagi bank dalam menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan lainnya.

Menurut Undang – Undang perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dilihat dari segi kegunaannya ada dua yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Kredit modal kerja diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai keperluan – keperluan yang habis dalam satu siklus usaha yaitu meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai tersebut dapat diterima kembali dalam bentuk uang tunai juga (Muljono, 2001:245).

Bank dalam menyalurkan kreditnya melakukan evaluasi terhadap faktor – faktor yang ada pada debitur, yaitu faktor 5C yang meliputi *Character* (kepribadian), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Conditional* (kondisi), dan *Collateral* (jaminan). Selain dari kelima faktor diatas bank juga perlu mempertimbangkan aspek – aspek lain seperti kelayakan usaha debitur, aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis dalam menyalurkan kredit. namun adakalanya bank melakukan ketidaktepatan dalam melakukan analisis kredit sehingga menimbulkan kendala yang salah satunya adalah tunggakan kredit.(Kasmir, 2006:104).

Sebagai salah satu upaya pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan terhadap kredit yang dijalankan kepada nasabah. Pengawasan dilakukan secara seksama baik secara keseluruhan maupun secara individual. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam usaha perkreditan. Kegiatan pengawasan merupakan pengawasan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan kredit merupakan hal yang sangat penting mengingat kredit merupakan “*risk asset*” bagi bank karena asset bank tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah (Muljono, 2001:459). Adanya pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan maka dapat diketahui apakah kredit tersebut digunakan debitur sesuai dengan apa yang telah diajukan dalam permohonan kredit. Misalnya kredit

tersebut diajukan sebagai modal usaha, maka dapat dilihat apakah usahanya bertambah maju atau tidak setelah menerima kredit tersebut.

Maksud dari diadakannya pengawasan kredit adalah untuk menjamin aktivitas kredit bank dan mengendalikan terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga timbulnya resiko kredit dapat diminimalisir. Pengawasan terhadap kredit yang diberikan hendaknya dilakukan sampai dengan kredit tersebut dibayar lunas oleh debitur.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang merupakan salah satu bank milik pemerintah yang tetap konsisten dalam memberikan layanan perbankan terhadap masyarakat sekitar akan kebutuhan jasa perbankan. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang menawarkan berbagai macam layanan kepada masyarakat dari produk tabungan hingga menawarkan produk kredit / pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan / usaha yang dijalani. Salah satu fasilitas yang banyak diminati oleh masyarakat adalah kredit, dan kredit yang banyak diajukan oleh masyarakat adalah kredit modal kerja, guna mengembangkan usaha.

Selama ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Tanjungrejo Kota Malang dalam menjaga agar kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak bank maka dilakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) unit Tanjungrejo Kota Malang bertujuan untuk menekan resiko kredit yang disalurkan kepada debitur yaitu kredit bermasalah / tunggakan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) meliputi pengawasan aktif dan pengawasan pasif yang dilakukan oleh bank kepada debitur. Akan tetapi walaupun tindakan pengawasan kredit sudah dilakukan, masih terjadi tunggakan kredit yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang yang semakin hari semakin meningkat prosentasenya.

Kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang yaitu kategori diragukan dan dan kredit macet dalam Non Performing Loan (NPL). Non Performing Loan merupakan rasio untuk mengukur kredit yang disalurkan, dengan cara membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan.

Berikut adalah data tentang kredit modal kerja yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang serta tunggakan kredit modal kerja selama periode 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012 :

**Tabel 1 Data Kredit Modal Kerja dan Tunggakan Kredit
Modal Kerja periode 31 Desember 2010 s/d 31
Desember 2012**

Tahun	Kredit Modal Kerja		Jumlah persentase tunggakan kredit modal kerja
	Disalurkan	Tunggakan kredit	
2010	16.838.502.000	482.502.000	2,86%
2011	18.097.617.500	552.617.500	3,05%
2012	18.500.450.000	693.866.375	3,75%

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang

Berdasarkan dari keterangan pada tabel 1 terlihat bahwa NPL (Non Performing Loan) yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Kota Malang selama 3 tahun terus meningkat dan dalam jumlah yang relatif tinggi, dimulai dari tahun 2010 terdapat NPL sebesar 2,86 % kemudian di tahun 2011 NPL meningkat menjadi 3,05 %, di tahun 2012 NPL meningkat cukup drastis yaitu sebesar 3,75 %.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit”**. (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang ?
2. Apakah terdapat kelemahan – kelemahan pengawasan kredit modal kerja yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang sehingga menyebabkan kenaikan tunggakan kredit modal kerja ?
3. Bagaimanakah pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang agar dapat menekan tunggakan kredit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang guna mengantisipasi tunggakan kredit.

2. Untuk mengetahui kelemahan – kelemahan pengawasan kredit modal kerja yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengawasan kredit modal kerja yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang agar dapat menekan tunggakan kredit.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan sistem pengawasan kredit.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi ini berikut sistematika pembahasan :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang pemikiran dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tinjauan-tinjauan atau landasan teori dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, serta tulisan ilmiah dari buku, majalah, maupun artikel-artikel, dan jurnal penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, penyajian data laporan keuangan, serta analisis, dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, dan saran-saran dari hasil penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah maupun perbaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang berhubungan erat dengan bidang keuangan. Seperti lembaga keuangan lainnya, bank juga menyediakan berbagai bentuk jasa keuangan. Lembaga perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pengertian bank adalah :

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. (Kasmir, 2012:03)

Pengertian lain dari bank adalah :

“Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”. (Hasibuan, 2004:03)

Pengertian lain dari bank menurut Undang – undang RI no 10 tahun 1998 , bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Berdasarkan pengertian- pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa di bidang keuangan yang meliputi :

- a. Menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana
- b. Menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana
- c. Perantara dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting keberadaannya dalam masyarakat yang kegiatan usahanya meliputi pemberian kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk berbagai tujuan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agen of trust*, *agen of development*, dan *agen of service* yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Lembaga yang berdasarkan kepercayaan

Dasar utama kegiatan perbankan adalah adanya kepercayaan pada kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah.

Nasabah percaya bahwa bank tidak akan menyalahgunakan uangnya, dikelola dengan baik, dan dapat ditarik kembali pada saat waktu yang telah dijanjikan. Sedangkan bank percaya

bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan sesuai jatuh tempo beserta bunga sesuai kesepakatan.

- b. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor riil dan sektor moneter tidak dapat dipisahkan dan selalu berinteraksi dan saling berpengaruh. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dan sangat diperlukan untuk kelancaran kinerja sektor riil.

- c. Lembaga yang memberikan jasa

Jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan pelunasan tagihan. (Budi Santoso, 2006:9)

3. Jenis Bank

Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan status kepemilikannya. Jenis – jenis bank adalah :

- a. Dilihat dari segi fungsinya
 - 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

- 1) Bank Milik Pemerintah
- 2) Bank milik swasta nasional
- 3) Bank milik koperasi
- 4) Bank milik asing
- 5) Bank milik campuran

c. Dilihat dari segi status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah :

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang mendapat ijin untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan oleh bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa. Bank non

devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas – batas satu negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga dapat dibagi menjadi:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2012:20)

Berdasarkan dari pendapat – pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan cara bank tersebut menentukan harga.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata latin “*credere*” yang artinya percaya dan “*credo*” yang artinya orang yang dapat dipercaya. Maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan dari pemberi kredit kepada orang yang membutuhkan kredit dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak.

Pengertian kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang harus disepakati. (Hasibuan, 2004:87)

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan no 10 tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian – pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah kegiatan penyediaan uang dari pihak pemberi kepada pihak penerima yang akan menimbulkan tagihan di pihak penerima, dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Unsur – Unsur Kredit

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama kredit tersebut dikururkan. Maka dari itu sebelum suatu kredit dikururkan perlu adanya penyelidikan dan penelitian kondisi nasabah agar dapat dilihat itikad dan kesungguhan dari nasabah tersebut.

b. Kesepakatan

Unsur kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit sangat diperlukan dalam perjanjian kredit. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan atas hak dan kewajiban masing – masing dan menuangkannya dalam akad kredit sebelum kredit tersebut dikucurkan.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad kredit. Dalam kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan dari masing – masing pihak.

d. Resiko

Akibat adanya tenggat waktu kredit, maka timbullah resiko macet atau tidak tertagihnya kredit tersebut. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin besar pula resiko dalam kredit tersebut. Resiko menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan bentuk keuntungan untuk bank dalam pemberian suatu kredit. Di bank konvensional bank jasa ini dikenal dengan bunga dan pembebanan administrasi kredit kepada nasabah, sedangkan di bank syariah balas jasa berupa prinsip bagi hasil. (Kasmir, 2012:114)

Pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.(Firdaus, 2008:3),

Menurut Sastradipoera (2004:156) adalah sebagai berikut:

- a. Amanat, yaitu segala hal yang dipercayakan pada manusia, baik yang berkaitan dengan hal dirinya, hal orang lain, maupun hal Allah. Bank yakin benar bahwa prestasi yang diberikan pada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu.
- b. Waktu, yaitu dalam setiap transaksi kredit terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya.
- c. Risiko, setiap kredit akan senantiasa mengandung risiko tertentu mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian.
- d. Prestasi, prestasi tampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi kredit pada penerima.
- e. Perjanjian keuangan, dalam keadaan khusus, utang dan kredit dalam perekonomian modern dinyatakan dalam satuan barang.

Berdasarkan dari pendapat – pendapat tersebut, maka pada dasarnya unsur kredit adalah terdapat kreditur dan debitur, adanya balas jasa berupa bunga yang dibayar debitur kepada kreditur, adanya jangka waktu pembayaran, adanya kesanggupan membayar, adanya resiko kredit serta adanya kesepakatan.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Setiap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemohon kredit, selalu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai bank. Tujuan dari pemberian kredit adalah :

- a. Memperoleh pendapatan dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana – dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Hasibuan, 2004:89)

Tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2012:116) adalah :

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama bank memberi kredit adalah mencari keuntungan, yang diperoleh dari bunga dan administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan bank dapat membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang dikucurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin banyak sektor yang dibangun. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah :

- 1) Penerimaan pajak dari keuntungan nasabah dan bank
- 2) Membuka kesempatan kerja karena banyak usaha baru yang membuka lapangan kerja baru.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- 4) Menghemat dan menambah devisa negara

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas tujuan dari pemberian kredit adalah memperoleh pendapatan dari bunga kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, membantu pemerintah, membantu nasabah yang membutuhkan modal kerja.

Kredit juga memiliki fungsi secara luas, selain memiliki tujuan. Fungsi kredit secara luas adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Meningkatkan gairah usaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. (Kasmir, 2012:117)

Sedangkan menurut Hasibuan (2004:88) fungsi kredit adalah :

- a. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- b. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- c. Meningkatkan hubungan internasional.
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- e. Meningkatkan daya guna barang.
- f. Meningkatkan gairah usaha masyarakat.
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- h. Meningkatkan income per kapita masyarakat.

Menurut Firdaus (2008:5), fungsi kredit adalah:

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tiak digunakan (*idle*). Dana yang idle tersebut jika dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan menjadi dana yang efektif.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi-potensi ekonomi yang ada.

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas fungsi kredit adalah pemenuhan jasa terhadap kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana guna menjalankan usahanya serta guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Jenis – Jenis Kredit

Terdapat beragam jenis usaha menyebabkan beragamnya kebutuhan akan dana, sehingga muncul beragam jenis kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Secara umum jenis – jenis kredit adalah :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak terdapat penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan pribadi.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang atau digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan. Kredit ini biasanya dikucurkan untuk supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, di atas tiga sampai lima tahun. Kredit ini biasanya dipergunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud. Jaminan disini dimaksudkan untuk menjamin nilai kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan. (Kasmir, 2012:120)

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu:

- a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya
 - 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
 - 2) Kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - 3) Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.
- b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.
 - 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitas, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
- c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya
 - 1) Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
 - 2) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
- d. Kredit dilihat dari sudut jaminannya
 - 1) Kredit tanpa jaminan
Dalam SK Direksi BI bertanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, pasal 2 telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit. Jaminan kredit tersebut adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 2) Kredit dengan agunan
Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagai berikut :
 - a) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap.
 - b) Agunan pribadi, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lainnya bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terhutang tidak menepati kewajibannya.
 - c) Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar di bursa efek. (Suyatno, 2003:88)

Dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu dari segi kegunaan, jangka waktu, jaminan dan segi usahanya.

5. Kredit Modal Kerja

Suatu perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, selalu membutuhkan modal. Modal tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan produktif perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembelian alat – alat produksi, dan lain – lain. Namun tidak semua perusahaan memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya dengan lancar. Salah satu cara perusahaan mendapatkan tambahan modal adalah dengan mengajukan kredit modal kerja kepada bank. Penyebab terjadinya perusahaan kekurangan modal kerja yaitu karena permintaan pasar yang meningkat secara signifikan sehingga pembelian stok barang juga harus meningkat dari keadaan normal, semakin besar penjualan maka semakin besar pula besaran pos piutang dagang yang diberikan kepada pelanggan, dan semakin lama waktu pembayaran yang diberikan kepada pelanggan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu pihak perusahaan membutuhkan adanya tambahan modal yang salah satu caranya dapat meminjam kepada pihak bank berupa kredit modal kerja.(Supriyono,2011:98)

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya. Contoh kredit modal kerja digunakan untuk pembelian bahan – bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan (Kasmir, 2002:77). Pengertian lain dari kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kredit untuk meningkatkan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif (Suyatno, 2003:28).

Adapun penggolongan kredit modal kerja adalah sebagai berikut :

1. Golongan I dengan suku bunga 9%/ tahun, adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras / gabah/ padi/ jagung untuk BUUD / KUD.
2. Golongan II dengan suku bunga 12% / tahun diperuntukkan untuk :
 - a. Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka bimbas dan inmas.
 - b. Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PIN. Garam serta kredit modal kerja PT. Garam.
 - c. Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - d. Kredit dan ekspor produsen eksportir.
 - e. Kredit produksi, impor, dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - f. Kredit impor dan penyaluran barang – barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - g. Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran kredit modal kerja.
 - h. Kredit modal kerja usaha pertanian dan kerajinan rakyat.
 - i. Kredit modal kerja untuk pertanian dan perunggasan rakyat.
3. Golongan III dengan suku bunga 13,5%/tahun diperuntukkan bagi :

- a. Kredit modal kerja untuk industri dan jasa- jasa.
 - b. Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - c. Kredit impor dan penyaluran barang – barang yang diawasi.
 - d. Kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
 - e. Kredit perdagangan dalam negeri termasuk perdagangan antar pulau.
 - f. Kredit modal kerja untuk kontraktor proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
4. Golongan IV dengan suku bunga 15%/tahun diperuntukkan bagi kontraktor diluar proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
 5. Golongan V dengan suku bunga 18%/tahun diperuntukkan bagi kredit impor dan penyaluran barang – barang impor yang tidak termasuk dalam bantuan luar negeri. (Suyatno, 2003:28).

6. Prinsip Penilaian Kredit

Dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah, bank harus merasa yakin bahwa kredit tersebut akan benar – benar kembali kepada bank. Keyakinan bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan kredit diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk medapat keyakinan tentang nasabahnya.

Penilaian terhadap nasabah dapat dilakukan dengan penilaian kriteria – kriteria serta aspek – aspek yang sudah menjadi standard bank. Biasanya kriteria penilaian umum yang harus dilakukan bank untuk

mendapatkan nasabah yang benar – benar layak untuk diberikan kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat debitur dapat dilihat dari latar belakang debitur seperti : gaya hidup, keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari analisa tentang karakter dapat disimpulkan tentang ukuran kemauan nasabah tersebut untuk membayar kreditnya.

b. *Capacity / Capability*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat dianalisa kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk mengetahui apakah penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. (Kasmir, 2012: 136)

Selanjutnya analisis 7P adalah :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam sesuai dengan kebutuhan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dan darimana saja sumber dana yang digunakan untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Profitability adalah cara untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah profit yang dihasilkan menguntungkan atau merugikan.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar – benar aman. (Kasmir, 2012: 136)

Sedangkan asas 3R yaitu :

- a. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila mencukupi untuk membayar kredit, maka kredit dapat diberikan. Apabila tidak mencukupi hendaknya kredit tidak diberikan.
- b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaan nya tetap berjalan.
- c. *Risk bearing ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan tersebut mengandung resiko besar atau kecil. (Hasibuan, 2006:108)

Disamping menggunakan prinsip 5C dan 7P , prinsip –prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan menilai seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek – proyek besar dan berjangka waktu panjang. Aspek - aspek yang dinilai adalah :

- a. Aspek yuridis/hukum

Yaitu menilai legalitas badan usaha serta izin – izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

- b. Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu menilai besar -kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran dari produk tersebut.

- c. Aspek keuangan

Yaitu menilai sumber – sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan penggunaan dari dana tersebut.

- d. Aspek teknis/operasi

Yaitu aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, layout usaha, serta lokasi usaha.

e. Aspek manajemen

Digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman dari SDM yang dimiliki,

f. Aspek sosial dan ekonomi

Yaitu menganalisis dampak yang timbul dari proyek yang diadakan terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum.

g. Aspek amdal

Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis dilakukan secara mendalam agar kelak proyek yang dilakukan tidak merusak lingkungan tempat proyek tersebut berjalan.

7. Kebijakan Penilaian Kredit

Kebijakan dalam menilai suatu kredit hendaknya dilakukan dengan teliti dan benar. Program perkreditan harus didasari oleh beberapa jasa yaitu:

a. Yuridis

Program perkreditan harus sesuai dengan undang – undang perbankan dan ketentuan bank indonesia.

b. Ekonomis

Menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.

c. Kehati-hatian

Besar plafon kredit yang diberikan harus berdasarkan penilaian dari aspek 5C, 7P, dan 3R. (Kasmir, 2012:140)

8. Prosedur Umum kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit dikucurkan oleh bank. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan dari suatu

permohonan kredit. Di dunia perbankan, prosedur pemberian dan penilaian kredit relatif sama, perbedaan terletak pada pertimbangan masing – masing bank dalam memilih nasabah. Secara umum prosedur pemberian kredit dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum, dan bertujuan untuk kredit konsumtif atau kredit produktif.

Prosedur pemberian kredit untuk sebuah badan hukum adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas – berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dalam bentuk proposal dengan dilampiri berkas – berkas yang dibutuhkan.

1) Proposal yang diajukan berisi :

a) Latar Belakang Perusahaan

Yaitu tentang riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, nama pengurus, perkembangan perusahaan, serta relasi perusahaan dengan pihak pemerintah dan swasta selama menjalankan usaha tersebut.

b) Maksud dan tujuan

Yaitu tentang tujuan dari pengajuan permohonan kredit bagi badan usaha.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh beserta jangka waktu kreditnya.

d) Cara pengembalian kredit

Yaitu cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank.

e) Jaminan Kredit

Merupakan jaminan – jaminan yang digunakan untuk menutupi segala resiko kredit yang mungkin terjadi selama masa kredit.

- 2) Melampirkan dokumen – dokumen yang meliputi fotokopi :
 - a) Akte notaris
 - b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d) Neraca Laporan rugi – laba tiga tahun terakhir
 - e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - f) Fotokopi sertifikat jaminan
- 3) Penilaian dari laporan rugi – laba dengan menggunakan rasio – rasio sebagai berikut :
 - a) *Current ratio*
 - b) *Acid test ratio*
 - c) *Inventory turn over*
 - d) *Sales to receivable ratio*
 - e) *Profit margin ratio*
 - f) *Return on net worth*
 - g) *Working on capital*

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah benar serta meneliti keabsahan dari berkas tersebut.

c. Wawancara awal

Merupakan penyidikan awal kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah meyakinkan pihak bank bahwa berkas – berkas yang diajukan sesuai dengan keinginan bank dan juga untuk menganalisa kebutuhan dan keinginan dari nasabah sebenarnya akan kredit yang diajukan tersebut.

d. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akandijadikan usaha atau jaminan. kemudian hasil dari pengamatan dicocokkan dengan wawancara awal.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas berdasarkan dari observasi yang dilakukan bank saat tahapan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan kredit

Yaitu untuk memutuskan bahwa kredit yang diajukan oleh nasabah diterima atau ditolak. Keputusan kredit yang diumumkan mencakup :

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Biaya – biaya yang harus dibayar
- 4) Waktu penciran kredit

g. Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, dimana sebelum kredit dicairkan maka nasabah harus menandatangani akad kredit, pengikatan jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian jika diperlukan.

h. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat –surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencarian dana dari bank sebagai realisasi kredit yang dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. (Kasmir, 2012:143)

C. Pengawasan Kredit

1. Pengertian pengawasan kredit

Untuk mengamankan fasilitas kredit yang dikururkan, bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap nasabah baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah diajukan atau tidak. “Pengawasan kredit

adalah usaha – usaha untuk menjaga agar kredit tetap lancar, produktif, dan tidak macet” (Hasibuan, 2006:105)

“Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi kredit yang benar”.(Arthesa, 2006:180),

“Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk pengamanan dan penjagaan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan – kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta megusahakan penyusunan administrasi kredit yang benar”. (Mulyono, 2001:460)

Dalam setiap kredit selalu terdapat resiko bahwa kredit tersebut tersebut berpotensi untuk menjadi kredit macet, maka bank perlu melakukan kegiatan pengawasan kredit. Kegiatan pengawasan kredit ini hendaknya dilakukan oleh pihak bank sejak masa awal pemberian kredit hingga kredit berakhir. Pengawasan kredit dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila antara pihak bank dan debitur tercipta hubungan dua arah yang harmonis dan dilandasi dengan sikap saling menghormati serta sifat saling membutuhkan dimana pengusaha memerlukan kredit dari bank untuk memajukan usahanya, dan bank memerlukan pengusaha dalam rangka perputaran dana di bank tersebut melalui kegiatan pemberian kredit.

2. Tujuan pengawasan kredit

Secara umum tujuan dari pengawasan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindari penyelewengan – penyelewengan baik dari oknum intern / ekstern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan ketepatan data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan data dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah tersebut di atas manual perkreditan dapat terlaksana dengan baik. (Muljono, 2001:460)

Tujuan pengawasan kredit antara lain :

- a. Menjaga agar kredit yang tersalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui kredit yang disalurkan lancar atau tidak.
- c. Melakuakn tindakan pencegahan dan penyelesaian terhadap kredit macet atau bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan – kesalahan karyawan dalam analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi presentase collectability credit yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank. (Hasibuan, 2006:105),

Dari poin – poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan kredit adalah untuk meminimalisir resiko kredit macet

yang terjadi pada debitur, menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, meningkatkan prosentase collectibility credit yang disalurkan bank, serta meningkatkan moral tanggung jawab karyawan analisis kredit.

3. Fungsi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (nasabah peminjam). Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan. (Arthesa, 2006:180),

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kredit adalah tindakan yang mengawasi penyimpangan kredit sejak dini guna menghindari adanya masalah kredit dan cepat memperbaiki apabila terdapat permasalahan kredit.

4. Macam – Macam Pengawasan Kredit

Dalam melakukan pengawasan kredit, pihak bank mempunyai beberapa cara dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Secara umum pengawasan kredit dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. Pengawasan aktif yaitu dilakukan pengawasan on the spot ditempat usaha para debitur sehingga apabila terjadi masalah segera dapat diambil tindakan untuk mengatasinya.

- b. Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan – laporan tertulis yang diberikan oleh debitur seperti laporan keuangan (dari neraca rugi/laba), laporan penyaluran keuangan, dan laporan lainnya.

Pengawasan kredit dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pengawasan berganda

Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat administrasi kredit, pengawasan ganda pada proses analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat rekomendasi kredit, pengawasan ganda pada proses putusan kredit dilakukan oleh setiap anggota komite kredit, dan pengawasan ganda pada proses dokumentasi kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dan pejabat administrasi kredit.

- 2) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat dilakukan dengan cara bahwa setiap pejabat di bidang kredit wajib secara langsung maupun tidak langsung secara berkala melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit. Pejabat pemutus melakukan pengawasan melekat atas pekerjaan pejabat rekomendasi kredit dan pejabat rekomendasi kredit melakukan pengawasan melekat kepada pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit setiap periode tertentu.

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan kredit, dibentuk sistem pengendalian intern perkreditan yang bertujuan mencapai portfolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Sistem pengendalian intern perkreditan meliputi kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan. Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan yang berkesinambungan, maka bank harus melakukan kajian atas sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan. Sistem pengawasan intern tersebut dilakukan oleh audit intern bank yang mencakup semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:268),

Pengawasan kredit dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. *Preventive Control of Credit* adalah pengembalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara :
 - 1) Penetapan plafon kredit.
 - 2) Pemantauan debitur.
 - 3) Pembinaan debitur.
- b. *Repressive control of credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan setelah kredit yang diberikan kepada debitur tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation*. (Hasibuan, 2006:106)

Berdasarkan pada pendapat – pendapat tersebut pengawasan kredit hendaknya dilakukan oleh bank secara aktif sejak awal pengajuan kredit hingga saat kredit tersebut telah dilunasi oleh debitur yang bersangkutan.

5. Kolektabilitas Kredit

Sebagai langkah – langkah pengamanan kredit, perlu dibuat kategori – kategori untuk menggambarkan keadaan kredit berdasarkan kelancaran pembayarannya. Pengelompokan kredit ini sangat diperlukan untuk acuan dalam tindakan pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah. Cara menghadapi nasabah dapat dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan kelancaran kreditnya. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/17/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektabilitas kredit menjadi :

- a. Lancar (Pas)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dikatakan lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Dalam Perhatian Khusus

Dalam perhatian khusus artiny kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu mendapat perhatian. Kriteria dari dalam perhatian khusus adalah :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- 2) Kadang – kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat – sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kriteria dari kurang lancar adalah :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang sudah diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah

d. Diragukan

Kemampuan nasabah untuk membayar kredit semakin meragukan .
kriteria dari diragukan adalah :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga

- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjangjian kredit maupun pengikatan jaminan

- e. Macet

Nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

D. Teknik Pengawasan Kredit

Dalam melakukan pengawasan kredit, bank menggunakan teknik – teknik pengawasan kredit yang telah disesuaikan dengan kondisi debitur yang kreditnya akan diawasi. “Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan – pendekatan yang dipakai oleh manajemen bank dalam melakukan pengawasan”(Muljono, 2001:472). Saat akan melakukan pengawasan kredit, bank hendaknya mempelajari terlebih dahulu sebab – sebab terjadinya kegagalan dalam perkreditan. Kegagalan kredit dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Masalah intern pada bank itu sendiri.

- b. Masalah perekonomian secara makro.
- c. Masalah – masalah yang menyangkut nasabah secara intern.(Muljono,2001:472)

Apabila terjadi kegagalan kredit ,dapat pula terjadi karena salah satu faktor di atas atau faktor – faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Setelah menganalisa sebab – sebab dari kegagalan kredit tersebut maka perlu diterapkannya teknik – teknik pengawasan kredit. Teknik pengawasan kredit yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1) *Verband Control*

Yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan – perkiraan saling berhubungan, dengan demikian jika suatu permintaan telah dibuktikan, maka dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya jika antar kedua hubungan tersebut terdapat kecocokan, maka hal ini perlu adanya sesuatu yang harus diselidiki lebih lanjut. Teknik verband controle merupakan salah satu cara untuk mengecek kebenaran informasi dari debitur untuk menguji kebenaran informasi yang mencurigakan. Teknik ini dilakukan secara tidak langsung / tersamar untuk membantu memecahkan permasalahan yang timbul.

2) Pengawasan Fisik atau Inspeksi *On the Spot*

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di perusahaan/tempat usaha nasabah.

Tujuan dari pengawasan fisik/*on the spot* adalah :

- a. Untuk mengecek kebenaran dari data /keterangan maupun laporan nasabah dibandingkan dengan jumlah secara nyata.
- b. Secara langsung melihat keadaan usaha nasabah dan mengajaknya berdiskusi tentang seluruh aktivitas perusahaannya.
- c. Secara tidak langsung menaruh perhatian terhadap usaha nasabah.
- d. Mendidik nasabah agar menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pelaksanaan pengawasan fisik dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pengawasan fisik rutin

Pengawasan fisik rutin harus dilakukan setidaknya-tidaknya 3 bulan sekali terhadap setiap nasabah tanpa terkecuali. Untuk nasabah yang berpotensi memiliki kredit macet atau pinjamnya relatif besar hendaknya pengawasan dilakukan satu bulan sekali.

b. Pengawasan *insidentil*/ pengawasan mendadak

Pengawasan insidentil dilakukan secara mendadak sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk kondisi seperti :

- a) Apabila mutasi rekening koran nasabah menjadi pasif .
- b) Adanya tunggakan angsuran.
- c) Adanya informasi negatif tentang nasabah dari pihak ketiga.
- d) Pada saat mengajukan permohonan perpanjangan dan/atau tambahan kredit.
- e) Pada saat perpanjangan pertanggungan .
- f) Untuk kredit investasi hendaknya dilakukan secara teratur pada setiap tahap dimana merupakan tahap – tahap kritis dari investasi tersebut.

c. *Monitoring* perkreditan

Monitoring perkreditan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk memonitor kredit dari debitur. *Monitoring* perkreditan ini dilakukan secara intern dan ekstern yaitu :

- 1) Informasi dari luar bank (ekstern)
 - a) Meminta laporan keuangan, stok, realisasi kerja
 - b) Melakukan inspeksi on the spot
 - c) Laporan akuntan, konsultan
- 2) Informasi dari dalam bank (intern)

- a) Penelitian mutasi keuangan nasabah dalam rekening koran sehingga diperoleh gambaran mutasi keuangan yang sebenarnya.
- b) Meneliti turn over dengan membandingkan debit dan kredit R/K pada beberapa bulan berjalan.
- c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah di setiap periode, agar dapat mengantisipasi apabila nasabah mulai mengalami overdraft.
- d) Mengawasi apakah nasabah selalu melakukan pelunasan pada tanggal – tanggal yang telah ditentukan.
- e) Meneliti buku – buku pembantu dan map – map kredit bermasalah. (Muljono, 2001:479)

Informasi intern dan ekstern yang telah diperoleh kemudian digabungkan untuk mengetahui persoalan pokok yang dialami oleh debitur. Sehingga dapat memudahkan dalam langkah – langkah penanganan yang perlu diambil oleh bank sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

E. Aspek – Aspek Pengawasan Kredit

Pengawasan (monitoring) kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yaitu:

- 1) Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer, *on line system*, dan sebagainya.
- 2) Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit, seperti laporan produksi, laporan penjualan, laporan utang dan piutang perusahaan, laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi), laporan tenaga kerja, laporan asuransi aktiva tetap, dan laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait.
- 3) Keharusan bagi wirakredit (*account officer*) untuk melakukan kunjungan (*visiti*) ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank,

baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.

- 4) Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Kesulitan tersebut mungkin terjadi pada berbagai masalah, seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, perpajakan, dan lain sebagainya. Konsultasi yang dilakukan secara dini pada umumnya dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet.
- 5) Adanya suatu sistem peringatan pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani nasabah yang bersangkutan). Peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wirakredit berbagai informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit, misalnya:
 - a) Pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimiliki nasabah, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank.
 - b) Besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (*outstanding* atau baki debit kredit).
 - c) Posisi nasabah berdasarkan kolektibilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah nasabah masih tergolong kredit lancar ataukah sudah menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan ataukah (bahkan) kredit macet. Posisi nasabah ini erat kaitannya dengan sistem pelaporan ke Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. (Dendawijaya, 2009:79),

Dari pendapat diatas pada dasarnya aspek – aspek pengawasan kredit adalah adanya administrasi kredit yang memadai, nasabah yang menyampaikan laporan kredit secara berkala, kunjungan account officer ke tempat usaha debitur, adanya konsultasi tersruktur antara pihak bank dan debitur dalam mengatasi problem kredit, adanya sistem peringatan pada administrasi bank yang dikelola oleh account officer untuk menangani apabila ada nasabah yang mulai bermasalah.

F. Tunggakan Kredit

1. Pengertian Tunggakan Kredit

Walaupun kebijaksanaan kredit telah dilakukan dengan baik dan analisis terhadap semua permohonan kredit telah dilakukan dengan teliti dan sistematis, tetap ditemukan adanya kredit yang bermasalah/menunggak. Masalah kredit yang menunggak merupakan resiko yang tidak dapat dihindari meski telah dilakukan pengawasan kredit yang sangat teliti. "Tunggakan kredit adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang bersangkutan". (Hasibuan, 2002:115),

2. Perhitungan Tunggakan Kredit

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Cara penghitungan suatu tunggakan kredit atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) berdasarkan SE BI No 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 dalam Almilia (2005:13) adalah sebagai berikut :

$$\text{NPL} = (\text{Kredit bermasalah} : \text{Total Kredit}) \times 100 \%$$

3. Penyebab dan Pencegahan Tunggakan Kredit

Tunggakan kredit dialami oleh hampir seluruh bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya. Tunggakan kredit harus disikapi secara serius, karena apabila kredit yang macet/menunggak semakin besar, maka akan menimbulkan potensi kerugian yang besar pula bagi bank. Tunggakan kredit muncul karena terjadi masalah pada

usaha atau pekerjaan nasabah. Misalnya usaha nasabah yang mengalami kerugian besar, nasabah yang kehilangan sumber penghasilan karena di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja sehingga kehilangan penghasilan untuk membayar kreditnya. Namun kredit bermasalah tidak hanya bersumber dari nasabah, peran pihak bank juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu kredit macet tersebut. Macetnya suatu fasilitas kredit dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

a. Dari pihak Perbankan

Pihak bank dalam melakukan analisis kredit kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi dan salah melakukan perhitungan. Dapat pula akibat terjadinya kolusi antara pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Penyebab macetnya kredit ditinjau dari pihak nasabah dapat diakibatkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya dari bank sehingga kredit tersebut macet.

- 2) Adanya unsur ketidak sengaja yaitu nasabah ingin membayar kredit tersebut akan tetapi tidak mampu karena sumber penghasilan yang diharapkan tidak ada karena bangkrut, musibah, dsb. (Kasmir, 2012:148)

4. Tindakan Penyelamatan Kredit

Setelah diketahui adanya tunggakan pada suatu fasilitas kredit, maka bank hendaknya segera melakukan tindakan penyelamatan kredit yang bermasalah tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian. Langkah penyelamatan yang dapat ditempuh dapat berupa penambahan jangka waktu pelunasan kredit bagi nasabah yang terkena musibah atau penyitaan jaminan bank bagi nasabah yang tidak mau membayar kreditnya.

Tindakan penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit / angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu pembayaran kredit.

- b. *Reconditioning*

Adalah tindakan bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga untuk meringankan beban nasabah sehingga nasabah dapat segera melunasi kredit.
- 4) Pembebasan bunga yaitu pembebasan pembayaran bunga oleh bank kepada nasabah, sehingga nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman tanpa dibebani dengan bunga.

c. Restructuring

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan restructuring meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah equity :
 - a) Dengan menyetor uang tunai.
 - b) Tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelesaian kredit yaitu *rescheduling, restructuring, reconditioning*.

e. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh bank apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya. (Kasmir, 2012:149)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Arikunto (2002:9), menjelaskan bahwa, pengertian dari penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi).”

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Penyusunan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah – masalah yang akan diteliti di dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Pengawasan kredit modal kerja dilihat dari teknik pelaksanaan pengawasan kredit.

- b. Analisis tunggakan kredit modal kerja (NPL) berdasarkan jumlah tunggakan kredit dibandingkan dengan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Malang yang beralamat di Jl Ir Rais no 119 Malang Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan satu macam data yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dengan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen – dokumen struktur organisasi, formulir permohonan kredit, data tunggakan kredit, data kredit yang disalurkan.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode :

- a. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau informasi yang diinginkan dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pimpinan, bagian perkreditan, dan pengawasan.

b. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen perusahaan seperti profil perusahaan dan struktur organisasi, peraturan pemerintah.

c. Observasi atau pengamatan

Adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang hal – hal yang berkaitan dengan sistem dan pengawasan kredit.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan pengumpulan data tersebut dapat berjalan secara sistematis. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian merupakan daftar pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan pada saat wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

b. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dokumentasi catatan-catatan yang terkait dengan pemberian kredit, pengawasa kredit, dan tunggakan kredit.

G. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menggolongkan, mengurutkan, dan meringkas data untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan sehingga hubungan dari masalah – masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya analisis data, maka dapat diketahui pemecahan dari masalah yang sedang diteliti.

Langkah – langkah dalam melakukan analisis data berdasarkan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengawasan kredit modal kerja

Menganalisis teknik pelaksanaan pengawasan kredit terhadap kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta

pengawasan pada setiap tahap pemberian kredit modal kerja sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja melalui :

- a. Inspeksi On The Spot
 - b. Pembinaan terhadap nasabah
 - c. Account Officer
2. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja berupa:
- a. Analisis jumlah debitur yang mengajukan kredit modal kerja
 - b. Jumlah kredit modal kerja yang disalurkan
 - c. Jumlah tunggakan kredit modal kerja (NPL) berdasarkan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan kepada nasabah.
3. Menganalisis kekurangan — kekurangan yang ditemukan dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ditemukan pada sistem pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan pengawasan kredit yang lebih baik.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terkemuka di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948 menyebabkan kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. Namun pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank Rakyat Indonesia, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUR pada tahun 1994 sebesar Rp.

6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Unit (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang merupakan kantor kas yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 1990 di Tanjungrejo. Seiring dengan berjalannya waktu status kantor kas dirubah menjadi kantor unit Tanjungrejo, kemudian pada bulan Mei tahun 2011 terdapat penambahan teras pasar Kasin setelah itu terdapat penambahan teras Mulyorejo pada bulan Januari tahun 2014.

2. **Visi dan Misi**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai dalam kegiatan usahanya. Visi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang adalah “Menjadi Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah”. Sementara itu misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang adalah:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerjasama yang tersebar luas dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Produk dan Jasa pelayanan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Kota Malang

- a. Tabungan Britama

Simpanan nasabah dari penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan di seluruh bank BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dan dilengkapi dengan fasilitas kartu BritAma PrimeCard. Tabungan BritAma memudahkan urusan hidup, fleksibel dan menguntungkan dengan System Real Time On-Line di seluruh Indonesia.

- b. Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dari Bank BRI bagi masyarakat dengan layanan yang praktis dan menguntungkan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus / Kantor Cabang (Kanca) / Kantor Cabang Pembantu (KCP) / BRI Unit, yang penyetorannya tidak dibatasi baik

frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Deposito

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

d. Giro BRI Rupiah

Giro BRI Rupiah merupakan produk simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan menggunakan warkat cek/bilyet giro atau surat perintah penarikan lainnya.

e. ATM BRI

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan produk yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI dengan berbagai jenis layanan seperti : informasi saldo dan penarikan tunai, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, registrasi e-banking, dan layanan lainnya.

Selain macam – macam produk perbankan yang ditawarkan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Tanjungrejo juga menawarkan berbagai jenis kredit. Adapun jenis kredit yang ditawarkan adalah :

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit ini merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi yang diberikan kepada usaha – usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Kredit Usaha Rakyat Mikro

Ditujukan bagi pelaku usaha yang baru merintis usahanya minimal 6 bulan berjalan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 20.000.000

b) Kredit Usaha Rakyat Ritel

Ditujukan bagi individu/koperasi yang mempunyai usaha produktif yang layak dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 500.000.000.

b. Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

Kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). Plafon kredit sampai dengan Rp 100.000.000,-

c. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai barang modal/aktiva tetap perusahaan seperti pengadaan mesin, kendaraan, bangunan. Plafon kredit mulai 100 juta hingga 40 milyar

Selain menawarkan produk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Unit Tanjungrejo Kota Malang juga memberikan jasa pelayanan bagi nasabah.

Jasa pelayanan tersebut antara lain:

a. Kliring

Merupakan penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

b. *Bill Payment*

Adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di teller BRI. Jenis tagihan yang dapat dibayar adalah tagihan PLN, telepon dan lain-lain.

c. Inkaso

Adalah penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga.

d. Western Union

Adalah salah satu jenis jasa pengiriman uang di BRI dari dan keluar negeri dengan aman dan cepat menggunakan jaringan *Western Union*.

Nasabah yang biasa menggunakan layanan ini antara lain keluarga TKI dan TKI, WNA yang bekerja di Indonesia, kepentingan bisnis, turis asing dan kepentingan darurat/ *emergency*.

e. Penerimaan setoran

Merupakan jasa penerimaan transaksi setoran atau pembayaran (*Payment*) untuk berbagai macam keperluan. Misalnya, setoran pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, setoran pembayaran gaji, setoran Ibadah Haji).

f. Transfer

Merupakan layanan pengiriman uang baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas.

g. Lalu Lintas giro (LLG)

Merupakan layanan pengiriman uang ke bank lain melalui sistem kliring.

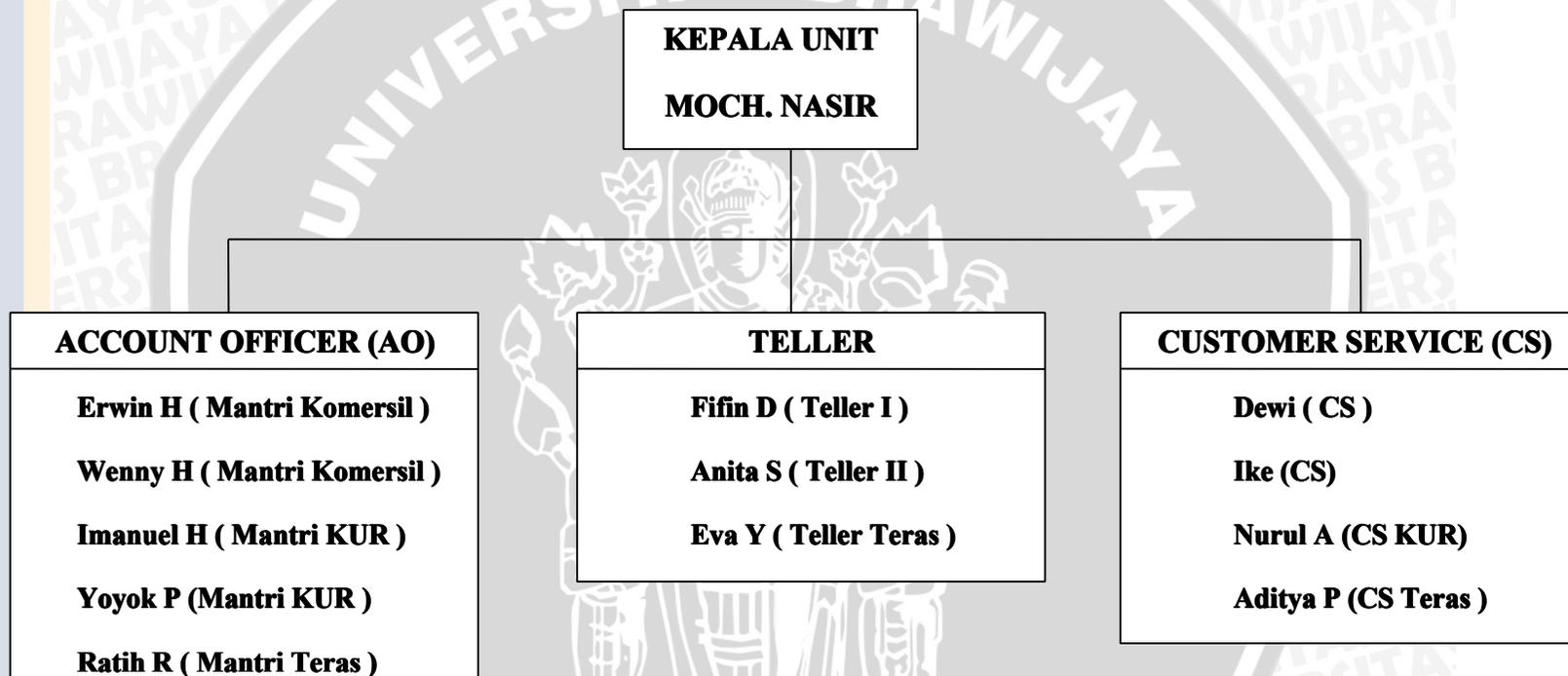
4. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia

Struktur organisasi yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Kota Malang dapat dilihat di gambar 1





Gambar 1 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang



Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang



Job description dari struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Unit

- 1) Melaksanakan prosedur kredit modal kerja di unit kerjanya secara benar sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit – Bisnis Mikro (PPK-BM).
- 2) Menegosiasikan rencana Kerja Anggaran (RKA) BRI Unit dengan Pimpinan Cabang (Pinca) / Pimpinan Area Mikro / Manajer Bisnis Mikro (MBM) atau dnegan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM).
- 3) Berperan aktif dalam pencapaian Rencana Kerja Anggara (RKA) guna mengoptimalkan kinerja BRI Unit.
- 4) Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mendukung pencapaian rencana kerja anggaran (RKA) BRI Unit.
- 5) Berperan secara aktif dalam strategi pengembangan kredit modal kerja BRI Unit serta menjalin hubungan profesional dengan debitur dan pihak ketiga terkait.
- 6) Menyampaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan kredit modal kerja kepada atasannya.

- 7) Bertanggung jawab atas kebenaran analisis kredit modal kerja yang akan diputus oleh Kepala Unit / Asisten Manajer Bisnis Mikro (ASBM) / Manajer Bisnis Mikro (MBM) / Pimpinan Cabang (Pinca).
- 8) Memutuskan dan merekomendasi kredit modal kerja sesuai kewenangannya.
- 9) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai kewenangannya dalam menganalisis/mengevaluasi/ merekomendasi dan memutuskan kredit modal kerja.
- 10) Mewakili BRI Unit dalam negosiasi dengan pihak ketiga guna meningkatkan pemasaran/pengembangan pinjaman.
- 11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit modal kerja berdasarkan data pengenalan dini dan melakukan rencana tindak selanjutnya.
- 12) Menindaklanjuti atas hasil temuan auditor intern/ekstern dari Resident Auditor Unit (RAU)/ Penilik.
- 13) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan kreidt modal kerja sesuai dengan perintah atasannya.

b. *Account Officer* (AO)

- 1) Melaksanakan prosedur kredit modal kerja di unit kerjanya secara benar sesuai pedoman pelaksanaan kredit –bisnis mikro (PPK-BM).
- 2) Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang ada untuk memberikan masukan dalam menyusun dan mendukung pencapaian rencana kerja anggaran (rka) BRI Unit.
- 3) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis terhadap debitur/calon debitur dan menetapkan prioritas pembinaan atas debitur yang dikelolanya.
- 4) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisis dan atau perekomendasi untuk setiap permohonan kredit modal kerja.
- 5) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan kewenangannya dalam menganalisis/mengevaluasi dan atau merekomendasi permohonan kredit modal kerja.
- 6) Melaporkan situasi dan kondisis usaha debitur baik yang masih lancar maupun memburuk, serta memberikan solusi atau usul kepada debitur.
- 7) Menyampaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan kredit modal kerja kepada atasannya.
- 8) Mengusulkan review dokumen atas kredit modal kerja yang bermasalah kepada Kepala Unit dan menindaklanjuti disposisi

Kepala Unit terhadap dokumen yang sudah direview oleh Kepala Unit dan *Customer Service* (CS).

- 9) Mewakili BRI dalam negoisasi dengan pihak ketiga guna meningkatkan pemasaran/pengembangan kredit modal kerja.
- 10) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit modal kerja berdasarkan data pengenalan dini dan melakukan rencana selanjutnya.
- 11) Menindaklanjuti hasil temuan auditor inter/ekstern dan resident auditor unit (RAU) / Penilik.
- 12) Melaksanakan tugas –tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan kredit modal kerja sesuai dengan perintah atasannya.

d. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon debitur dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bisnis BRI Unit.
- 2) Pengurusan kas bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- 3) Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran dari dan kepada nasabah untuk kepentingan bisnis BRI Unit.

- 4) Menyetorkan setiap kelebihan kas selama jam kerja dan menyetorkan sisa kas pada akhir ke kas induk untuk keamanan kas BRI Unit.
- 5) Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang teller untuk kelancaran pelayanan nasabah.
- 6) Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan Over Booking (OB) yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpanan kas teller.
- 7) Membuat register kas teller untuk tertib administrasi.

e. *Customer Service* (CS)

- 1) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah, dari nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan nasabahnya.
- 2) Menatausahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
- 3) Menatausahakan register simpanan untuk mencegah kerugian bank.
- 4) Menatausahakan kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan.

- 5) Menyimpan berkas pinjaman dan agunan dalam rangka pengamanan asset bank.
- 6) Menatausahakan pengarsipan bukti –bukti pembukuan dan pengelolaan penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan untuk tertib administrasi.
- 7) Mencetak daftar mutasi harian (DMH) dan melakukan verifikasi awal untuk mencegah terjadinya fraud /pelanggaran pada saat jam pelayanan berlangsung.
- 8) Membuat dan mengadministrasikan laporan – laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada Kepala Unit dan Kantor Cabang yang meliputi laporan Management Information Report (MIR), Laporan Keuangan, Laporan Bank Umum (LBU), dan Sistem Informasi Debitor (SID), serta laporan kekuatan pegawai dan laporan temuan khusus.
- 9) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar dari dan ke BRI Unit untuk tertib administrasi.
- 10) Membuat nota – nota dari dan ke Kantor Cabang untuk tertib administrasi.
- 11) Menatakerjakan persediaan logistik BRI Unit agar terjadi kesesuaian antara persediaan fisik dengan pembukuannya.

- 12) Membuat nota – nota ke Kantor Cabang untuk perhitungan utang – piutang likuiditas.

B. Penyajian Data

1. Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Kota Malang

Sebelum kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan, terdapat prosedur – prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. *Customer service* menerima berkas – berkas pengajuan kredit modal kerja dari calon debitur sesuai persyaratan administrasi yang telah ditentukan, yaitu :
 - a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 lembar. Apabila calon debitur sudah menikah, maka harus menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
 - c. Surat keterangan usaha (SKU) dari desa atau kelurahan atau fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).

- d. Agunan yang akan dijaminkan, seperti sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan lain – lain.
2. *Customer service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas – berkas yang dibawa oleh calon debitur dan menyiapkan formulir pengajuan pinjaman, kemudian *customer service* mengisikan data calon debitur pada formulir pengajuan pinjaman.
3. *Customer service* meminta SID (Sistem Informasi Debitur) pada Bank Indonesia secara online atau BI checking. BI Checking kemudian akan diperiksa oleh *Customer Service* guna mengetahui apakah calon debitur tersebut mempunyai pinjaman di bank lain atau kredit kendaraan bermotor. Apabila terdapat pinjaman di bank lain atau debitur tersebut memiliki kredit kendaraan bermotor, maka pengajuan kreditnya ditolak dan dokumen persyaratan administrasi yang telah disetorkan oleh debitur berupa fotokopi KK, fotokopi KTP, SKU, dan agunan/jaminan akan dikembalikan. Bagi calon debitur yang tidak memiliki kewajiban kredit di bank lain atau kredit kendaraan bermotor, maka pengajuan kreditnya akan diproses lebih lanjut. Calon debitur kemudian menandatangani formulir pengajuan pinjaman yang telah diisikan data dirinya oleh *customer service* sebelumnya.
4. Berkas SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) milik calon debitur tersebut kemudian dicatat di register SKPP tanggal pengajuan kreditnya dan diberi nomor pangkal.

5. *Customer service* menyerahkan berkas SKPP kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapannya dan ditindaklanjuti.
6. Berkas SKPP yang telah diberi nomor pangkal tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapannya. Kemudian Kepala Unit memberikan disposisi pada berkas SKPP. Berkas SKPP yang telah didisposisi diserahkan kembali pada *customer service*.
7. *Customer service* menerima kembali berkas SKPP yang telah diperiksa dan didisposisi oleh Kepala Unit, selanjutnya *customer service* mencatat tanggal disposisi di buku register SKPP.
8. Kemudian *Customer service* segera menyiapkan formulir laporan penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan.
9. Formulir laporan penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan dan berkas SKPP yang telah didisposisi oleh Kepala Unit kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk kunjungan ke tempat nasabah (*Inspeksi On The Spot*).
10. *Account Officer* menandatangani register penyerahan SKPP sebagai tanda terima dari *Customer service*. Apabila berkas SKPP yang akan diperiksa lebih dari satu, maka SKPP disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga mudah ditemukan saat dilakukan kunjungan *On The Spot*.

11. Setelah *Account Officer* menerima dan memeriksa kembali kelengkapan berkas SKPP dari *customer service*, maka berdasarkan disposisi Kepala Unit, *Account Officer* akan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur dengan memperhatikan hal – hal berikut :

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter terhadap calon debitur ini adalah untuk mengetahui bagaimana itikad atau niat baik dari calon debitur untuk membayar kembali hutangnya pada saat yang ditentukan.

BRI Unit Tanjungrejo dalam melakukan analisisnya melakukan pencarian informasi mengenai karakter calon debitur, reputasi pribadi, dan integritasnya secara mendetail guna mengetahui kelayakan debitur tersebut apabila diberikan kredit. Dalam upaya mengetahui karakter calon debitur yang bersangkutan pihak BRI Unit Tanjungrejo melakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Mengetahui karakter lebih dekat calon debitur dari wawancara secara langsung.
- 2) Melakukan penyelidikan langsung mengenai calon debitur pada keluarga dan tetangga tentang latar belakang dan keseharian calon debitur.

3) Mengadakan *Bank Checking*, mengumpulkan keterangan dari aktivitas calon debitur di dunia perbankan, apakah termasuk black list Bank Indonesia. *Bank Checking* dilakukan oleh pihak bank hanya terhadap calon debitur baru dan debitur dengan jumlah kredit relatif besar.

b. *Capacity*

Bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam kapasitas kemampuan mengembalikan pinjaman yang telah diajukannya secara tepat waktu dari usaha yang dijalankannya.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan analisis terhadap kemampuan debitur dalam mengelola modal yang dimiliki dari usaha yang dijalankannya.

d. *Condition* (Kondisi)

Merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur serta bagaimana debitur tersebut mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

e. *Collateral* (Agunan)

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana agunan tersebut dapat menutupi kredit calon debitur apabila terdapat

tunggakan kredit. Harga agunan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan sehingga apabila terjadi kredit macet dapat menutupi tunggakan kredit.

12. Selanjutnya *Account Officer* membuat usulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Unit. Berkas SKPP yang telah didisposisi, laporan penilaian jaminan, dan laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan diserahkan kepada *Customer service* untuk dicatat tanggal penerimaan SKPP pada register SKPP. Selanjutnya berkas SKPP terdisposisi dan rekomendasi tersebut diserahkan kepada Kepala Unit.

13. Kepala Unit menerima berkas SKPP terdisposisi dan rekomendasi, kemudian Kepala Unit memeriksa berkas SKPP terdisposisi dan rekomendasi.

14. Kepala Unit memberikan Putusan Kredit untuk kredit diterima maupun kredit yang ditolak.

- 1) Kepala unit memutuskan untuk menolak kredit yang diajukan, maka *Customer service* membuat putusan surat penolakan kredit disertai alasan penolakannya.
- 2) Kepala unit menyetujui kredit yang diajukan kemudian diserahkan kepada *Customer service* untuk diperiksa kelengkapan dokumen kreditnya serta memberikan putusan nominal kredit yang disetujui.

15. *Customer service* menerima dan memeriksa berkas SKPP terdisposisi dan rekomendasi yang sudah diperiksa, dan sudah diputuskan nominal nilai kredit yang disetujui oleh Kepala Unit. Selanjutnya *Customer service* mencatat tanggal pemberian keputusan kredit dan besarnya nominal kredit yang disetujui oleh Kepala Unit pada register SKPP, dan kemudian arsip.
16. *Customer service* mempersiapkan SPH (Surat Perjanjian Hutang), SPA (Surat Penjaminan Agunan), dan kuintansi, lalu menghubungi calon debitur. Calon debitur kemudian melakukan tanda tangan dokumen kredit yang terdiri dari SPH (Surat Perjanjian Hutang), SPA (Surat Penjaminan Agunan), dan kuintansi. Proses ini biasanya disebut dengan Real/Realisasi. Setelah data terisi semua, SPH, SPA dan kuintansi tersebut diserahkan kepada Kepala Unit untuk dimintakan tanda tangan.
17. Setelah SPH, SPA dan kuintansi ditanda tangani oleh Kepala Unit, SPH dan SPA diserahkan kepada *Customer service*, sedangkan kuintansi rangkap 3 diserahkan kepada Teller.
18. Setelah menandatangani SPH, SPA dan kuintansi, Kepala Unit memberikan pembinaan terhadap debitur.
19. Setelah debitur mendapatkan pembinaan dari Kepala Unit, debitur menuju Teller untuk menerima pencairan dana melalui rekening. Kemudian debitur menerima kuintansi 1. Kuintansi 2 diserahkan Teller

kepada *Customer service* untuk arsip, sedangkan kuintasi 3 disimpan oleh Teller sebagai arsip.

20. *Customer service* menerima SPH, SPA dan kuintansi 2 yang kemudian diarsip.

21. Debitur menerima kuitansi 1 dan pencairan dana pada rekening.

2. Pengawasan Kredit Modal Kerja

Sebagai upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit, perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian kredit. Oleh karena itu diperlukan adanya prosedur pengawasan dalam setiap tahapan pemberian kredit yang didalamnya mengandung unsur pengawasan ganda dan unsur pengawasan melekat.

a. Pengawasan Ganda (Dual Control)

Merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi, terhadap tahapan pemberian kredit yang mengandung kerawanan akan penyalahgunaan kredit dan atau kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan bagi BRI.

Pengawasan terhadap proses yang memiliki resiko kerawanan adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan pada tahap pendaftaran kredit modal kerja

- a) Calon debitur harus mendaftar sendiri untuk kredit yang akan diajukannya di Kantor BRI Unit guna mencegah timbulnya penyimpangan yang dapat merugikan BRI Unit.
 - b) Pelayanan atas setiap pendaftaran kredit harus dilakukan oleh *Customer service* setelah debitur memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
 - c) *Customer service* harus menjelaskan kepada debitur mengenai ketentuan – ketentuan kredit secara benar, guna menghindari keluhan di kemudian hari.
 - d) Setiap Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) kredit harus dicatat pada buku register SKPP guna mengetahui lamanya penyelesaian satu SKPP oleh *Customer service*.
- 2) Pengawasan pada tahap pemeriksaan kredit modal kerja
- a) Ka unit memberikan disposisi / catatan kepada Mantri yang ditunjuk untuk memeriksa SKPP tersebut.
 - b) Pemeriksaan dilakukan oleh mantri yang ditunjuk setelah mendapat disposisi dari Ka unit.
 - c) Pemeriksaan dilakukan di tempat usaha/rumah debitur/lokasi agunan serta hasil dari pemeriksaan ditandatangani oleh pemilik agunan.

d) Secara administratif, pejabat pemutus kemudian memeriksa hasil pemeriksaan dari pejabat pemrakarsa.

3) Pengawasan pada tahapan putusan permohonan kredit modal kerja

Dalam setiap putusan permohonan kredit, terdapat hal – hal penting yang harus diperhatikan pengawasannya yaitu :

a) Kewajaran besarnya putusan kredit dikaitkan dengan besarnya usulan pejabat pemrakarsa.

b) Kesesuaian besarnya putusan kredit dengan keputusan pejabat pemutus.

4) Pengawasan Sebelum Pencairan Kredit Modal Kerja

a) *Customer service* berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan keputusan.

b) Ka unit harus memfiat kuitansi pencairan kredit sebelum dilakukan pembayaran.

c) *Customer service* dan Ka unit harus meyakini bahwa biaya – biaya sehubungan dengan pencairan kredit yang telah disetorkan oleh debitur.

d) *Customer service* menjelaskan kepada debitur tentang hak dan kewajibannya selama menjalani proses kredit.

- e) *Customer service* dan Ka unit harus memastikan bahwa Sura Pengakuan Hutang (SPH) dan surat – surat pengikatan agunan telah diisi secara lengkap dan benar serta telah ditandatangani / cap jempol oleh debitur / pemilik agunan.
- f) *Customer service* dan Ka unit harus memastikan bahwa jumlah pinjaman pada SPH sama dengan jumlah putusan yang tertera pada putusan serta nilai pengikatan agunan minimal harus sama dengan jumlah kewajiban debitur dan tertera dalam putusan kredit.
- g) *Customer service* dan Ka unit harus memastikan bahwa kuitansi pencairan kredit telah dibuat dengan benar, lengkap, dan jumlah yang tertulis telah sesuai dengan putusan yang ditandatangani oleh debitur.
- 5) Pengawasan saat pencairan kredit modal kerja
- Teller memastikan bahwa :
- a) Kuitansi pencairan kredit telah difiat oleh Ka unit dan ditandatangani oleh debitur.
- b) Menjelaskan kepada debitur jumlah kredit modal kerja yang dibayar dan kewajibannya.
- c) Kredit yang dibayarkan kepada debitur yang berhak.

6) Pengawasan setelah pencairan kredit

Saat kredit telah dicairkan, Ka unit memastikan bahwa *Customer service* telah :

- a) Melakukan pencatatan pada daftar peserta Asuransi Jiwa Kredit, asuransi kerugian atas agunan pada hari itu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Melakukan pemeriksaan isi berkas kredit dan disusun secara urut. Isi berkas kredit berupa :
 - 1) Kuintasi Pencairan Kredit.
 - 2) Copy Identitas Debitur
 - 3) Tindakan tanda terima bukti dokumen penting.
 - 4) Formulir Pendaftaran Kredit Modal Kerja.
 - 5) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/pihak yang berwenang.
 - 6) Copy perijinan usaha SIUP
 - 7) Surat Pengakuan Hutang.
 - 8) Surat Pengikatan Agunan.
 - 9) Tanda bukti kepemilikan agunan.
- 7) Pengawasan terhadap angsuran kredit

- a) Ka unit harus meyakini bahwa semua kewajiban debitur yang berupa kewajiban pokok dan bunga yang dibayar telah dicatat / dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Pada saat pelunasan kredit, maka sebelum melakukan penyerahan kepada dokumen kepada pemilik agunan yang berhak, Ka unit harus yakin bahwa seluruh proses pelunasan dan penutupan rekening debitur telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Pengawasan setelah kredit modal kerja

Pengawasan kredit modal kerja kemudian dilanjutkan pada saat kredit modal kerja diberikan kepada debitur. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap debitur yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian dari resiko yang ditimbulkan mengingat masalah tunggakan kredit biasanya terjadi setelah kredit modal kerja diberikan kepada debitur. Berikut adalah langkah – langkah pengawasan yang dilakukan :

a) Pembinaan Nasabah

Pembinaan nasabah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terjadwal kepada debitur sejak kredit mulai dicairkan hingga kredit tersebut dilunasi agar bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kegiatan pembinaan nasabah meliputi penilaian terhadap perkembangan usaha

debitur, kepatuhan dalam melakukan perjanjian dengan bank, penggunaan kredit apakah sesuai dengan tujuan yang diajukan saat mengajukan kredit, dan kepentingan – kepentingan lain yang mengarah pada kepentingan pelunasan kredit.

b) Administrasi Perkreditan

Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah – langkah penilaian atas perkembangan kredit atau usaha yang dilakukan oleh debitur dan pengawasan kredit sehingga kepentingan bank terpenuhi. Diharapkan dengan tertibnya menjalankan administrasi kredit diharapkan dapat dijadikan sumber bahan perbaikan dalam kebijakan perkreditan dan juga sebagai sumber dalam menyiapkan laporan bagi kredit yang bersangkutan.

9) Pengawasan terhadap kerawanan kredit

a) Pengawasan terhadap kredit fiktif

Kredit fiktif adalah kredit yang data debitur yang ada merupakan data fiktif / palsu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penyalahgunaan wewenang dengan memberikan kredit fiktif biasanya dilakukan oleh oknum Bri Unit untuk kepentingan pribadi, juga digunakan untuk menutup tunggakan debitur melalui kerja sama antara oknum petugas BRI Unit dengan debitur.

Pengawasan terhadap kredit fiktif dapat dilakukan dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari kredit yang dicurigai merupakan kredit fiktif yaitu alamat debitur yang tidak jelas serta fotokopi identitas yang diragukan kebenarannya.

b) Pengawasan terhadap kredit topengan

Kredit topengan adalah kredit yang dicairkan dengan mengatasnamakan orang lain, baik debitur dan pemakainya kebanyakan sudah mengenal dan memang melakukan kerjasama.

Dalam prakteknya di lapangan, kredit dicairkan untuk beberapa orang debitur, namun hanya satu – dua orang yang menikmati kredit tersebut dan berbeda dari debitur yang tercatat di BRI.

Pengawasan terhadap kredit topengan dilakukan dengan cara memperhatikan beberapa indikasi yang terlihat dari kredit bersangkutan seperti :

- a) Berkas kredit dan formulirnya tidak diisi lengkap
- b) Nama debitur dan tanda tangan yang bersangkutan tidak cocok atau meragukan.
- c) Terdapat kesamaan jumlah kredit yang dicairkan oleh beberapa orang tersebut.

- d) Lokasi usaha / domisili debitur tersebut berdekatan / sama.
- e) Tanda tangan debitur pada dokumen – dokumen kredit sering tidak sama, karena banyaknya tanda tangan palsu yang dipakai.
- f) Tanggal angsuran yang cenderung sama selama beberapa waktu.

c) Pengawasan terhadap kredit tempilan

Kredit tempilan merupakan istilah yang dipakai BRI untuk kredit yang dicairkan oleh satu orang, namun dalam penggunaannya kredit tersebut dipakai oleh beberapa orang.

Pengawasan terhadap kredit tempilan dapat diajukan dengan cara memperhatikan indikasi yang terlihat dari pola angsuran yang selalu kurang, namun cenderung sama dalam jumlah dan periode tertentu.

d) Pengawasan terhadap percaloan kredit

Percaloan kredit adalah kredit yang diproses oleh oknum petugas BRI Unit dengan melanggar ketentuan yang ada, seperti tidak adanya pemeriksaan *on the spot* dan dicairkan dengan perantara pihak ketiga (calo). Kredit dengan perantaraan calo ini cenderung over kredit dan ada pungutan –

pungutan liar untuk kepentingan calo maupun oknum petugas BRI Unit.

Pengawasan terhadap percaloan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan indikasi – indikasi dengan adanya orang – orang tertentu yang sering berada di Kantor BRI Unit yang apabila diamati dengan seksama sebenarnya yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan selain menjadi calo kredit.

b. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan pengendalian internal yang bersifat terus menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif maupun secara represif yang bertujuan agar tugas yang dibebankan kepada bawahannya tersebut berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian kredit yaitu :

- a. Setiap pejabat di bidang kredit baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit sejak dari penetapan kredit sampai dengan pelunasan kredit.

- b. Pengawasan terhadap kualitas proses pemberian kredit dan fasilitas kredit yang diberikan kepada debiturnya dengan cara memastikan bahwa pejabat yang menjadi bawahannya telah melaksanakan seluruh proses pemberian kredit secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh pejabat pemutus terdapat kualitas / hasil kerja pejabat pemrakarsa.
- d. Setiap 3 bulan sekali pejabat pemutus wajib melaporkan secara tertulis beserta penjelasan tentang kualitas kredit yang menjadi putusannya kepada atasannya.
- e. Untuk memastikan bahwa terdapat penyimpangan terhadap KUP – BRI, PPK BM dan ketentuan lainnya dapat diketahui sejak dini yaitu dengan cara :
 - 1) Kanwil (bagian ADK) melakukan penelitian ke BRI Unit secara sampling minimal 1x dalam 1 tahun yang waktunya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengujian di Kanca yang bersangkutan. Dalam melakukan pengujian ini Kabag ADK dapat memanfaatkan laporan pemeriksaan ke BRI Unit yang telah dilakukan oleh Resident Audit Unit.
 - 2) Kabag DK kanwil melaporkan hasil pengujian tersebut secara periodik kepada Pinwil dengan tindakan Divisi

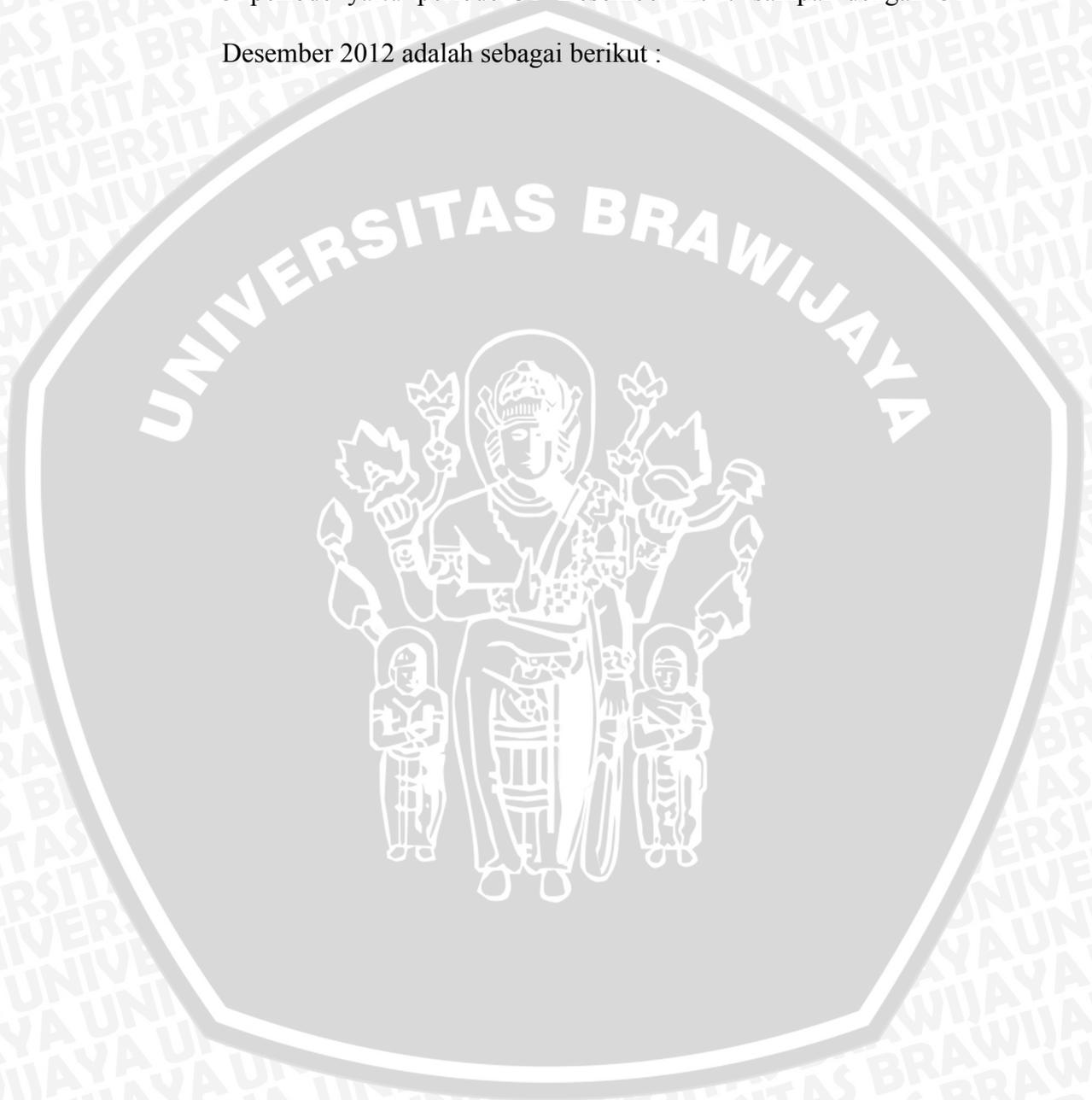
ADK Kanpus. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Kanwil melaporkan hasil penelitian tersebut beserta langkah yang telah dilakukan oleh kanca kepada Direktur UMKM melalui divisi Bisnis Mikro.

- 3) Pengawasan melekat secara khusus harus dilakukan Ka unit dan *Customer service* terhadap dokumen primer seperti surat pengakuan hutang, surat pengikatan agunan dsb, bahwa dokumen – dokumen tersebut lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Guna mengendalikan, mengarahkan, dan menjamin bahwa pengawasan melekat telah berjalan dengan baik dan pelaksanaan pencapaian sasaran telah berjalan dengan efektif, maka atasan langsung wajib melakukan penelitian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan bawahannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

c. **Tunggakan Kredit**

Tunggakan kredit merupakan kredit yang pembayarannya tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati saat pengajuan kredit. Tunggakan kredit merupakan masalah yang sering dialami oleh bank dan berpengaruh pada tingkat kesehatan

bank. Berikut perincian dari kolektabilitas kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang selama 3 periode yaitu periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :



Tabel 2 Kolektabilitas Kredit Modal Kerja

Periode berakhir 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012

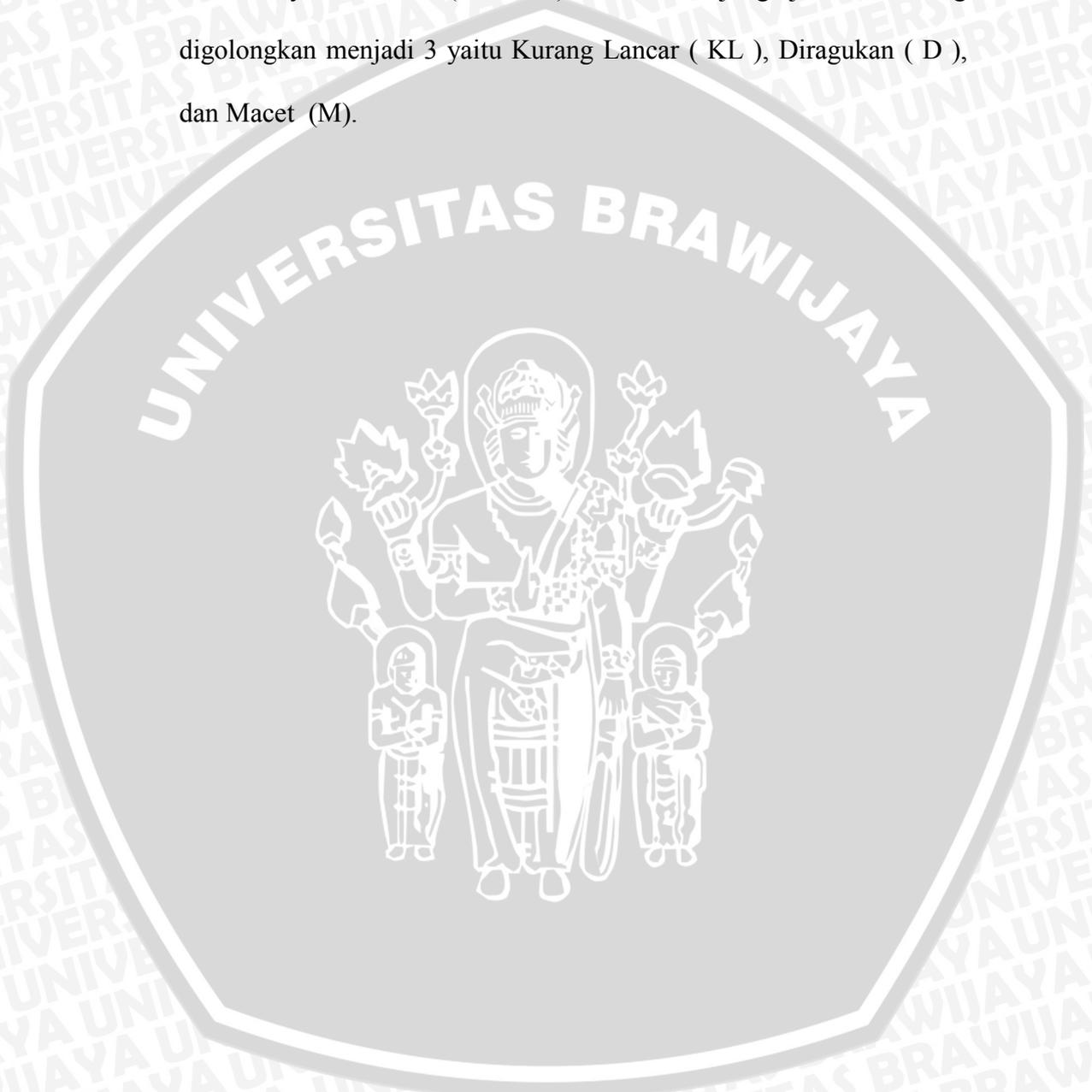
Tahun	Lancar		Dalam pengawasan khusus		Kurang lancar		Diragukan		Macet		Total Kredit Modal Kerja	
	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah
2010	1200	14.550.000.000	220	1.806.000.000	60	100.834.000	40	179.650.000	70	202.018.000	1590	16.838.502.000
2011	1350	15.545.000.000	250	2.000.000.000	55	125.583.000	65	197.696.000	100	229.338.500	1820	18.097.617.500
2012	1450	15.506.583.125	279	2.300.000.000	40	119.831.875	79	254.450.500	131	319.585.000	1979	18.500.450.500
Jumlah	4000	45.601.583.125	749	6.106.000.000	155	346.248.875	184	631.796.500	301	750.941.500	5389	53.436.570.000

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang, 2012

Tabel 2 diatas merupakan tabel kolektabilitas kredit modal kerja yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang dan kolektabilitas modal kerja terbagi menjadi 5 kategori yaitu Lancar (L), Dalam Pengawasan Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Dari data yang terdapat di tabel 2 dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit selama 3 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dalam penyaluran kredit dan juga peningkatan debitur yang mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK). Pada tahun 2010 jumlah debitur yang mengajukan kredit modal kerja sebanyak dengan 1590 orang dengan jumlah kredit yang disalurkan sebanyak Rp16.838.502.000,00. Tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah debitur yang mengajukan kredit modal kerja sebanyak 1820 orang dengan jumlah kredit yang disalurkan meningkat sebesar Rp18.097.617.500,00. Pada tahun 2012 jumlah debitur yang mengajukan kredit modal kerja mengalami peningkatan dengan jumlah 1979 orang dengan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan sebesar Rp18.500.450.500,00. Setiap tahun terdapat peningkatan debitur yang mengajukan kredit modal kerja serta jumlah kredit modal kerja yang disalurkan ikut meningkat.

Selanjutnya adalah data tunggakan kredit (Non Performing Loan) yang disajikan dalam tabel selama 3 tahun berdasarkan jenis kolektabilitas. Tunggakan Kredit (Non Performing Loan) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Tanjungrejo Kota Malang digolongkan menjadi 3 yaitu Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).



Tabel 3 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja

Periode yang berakhir 31 Desember 2010 – 31 Desember 2012

Tahun	Kurang lancar		Diragukan		Macet		Total Tunggakan Kredit Modal Kerja	
	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah
2010	60	100.834.000	40	179.650.000	70	202.018.000	170	482.502.000
2011	55	125.583.000	65	197.696.000	100	229.338.500	220	552.617.500
2012	40	119.830.875	79	254.450.500	131	319.585.000	250	693.866.375

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang

Tabel 4 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Jenis Kredit yang Disalurkan Periode yang berakhir Desember 2010

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektabilitas						Total	
		Kurang Lancar		Diragukan		Macet			
		Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah
1	Pertanian	15	35.500.000	12	59.550.000	19	65.509.000	46	160.559.000
2	Perdagangan	35	49.417.000	20	91.825.000	40	110.008.000	95	251.250.000
3	Jasa Dunia Usaha	10	15.917.000	8	28.275.000	11	26.501.000	29	70.693.000
	Total	60	100.834.000	40	179.650.000	70	202.018.000	170	482.502.000

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang

Tabel 5 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Jenis Kredit yang Disalurkan Periode yang berakhir Desember 2011

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektabilitas						Total	
		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Jumlah Debitur	Jumlah
		Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah		
1	Pertanian	18	45.286.500	20	65.500.000	30	85.500.000	68	196.286.500
2	Perdagangan	30	80.926.500	35	108.848.000	55	131.255.000	120	321.029.500
3	Jasa Dunia Usaha	7	20.997.500	10	33.348.000	15	45.838.500	32	100.184.000
	Total	55	147.210.500	65	207.696.000	100	262.593.500	220	617.500.000

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang

Tabel 6 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Jenis Kredit yang Disalurkan Periode yang berakhir Desember 2012

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektabilitas						Total	
		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Jumlah Debitur	Jumlah
		Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah		
1	Pertanian	15	38.750.500	25	75.000.000	37	95.750.000	77	209.500.500
2	Perdagangan	20	60.250.000	42	110.430.000	75	157.792.500	137	328.472.500
3	Jasa Dunia Usaha	5	29.830.375	12	60.020.500	19	66.042.500	36	155.893.375
	Total	40	128.830.875	79	245.450.500	131	319.585.000	250	693.866.375

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja

Pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang pada umumnya sesuai dengan teknik pengawasan yang berlaku di dalam dunia perbankan dalam usahanya memperkecil tunggakan kredit. Namun dalam praktek di lapangan, penerapan teknik tersebut berjalan kurang optimal dalam menekan tunggakan - kredit yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang. Kekurangan – kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan kredit yang selama ini dilakukan adalah :

a. Inspeksi On The Spot

Inspeksi On The Spot dilakukan apabila kredit dikucurkan sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Karena salah satu langkah dalam prosedur pemberian kredit adalah adanya inspeksi atau penilaian yang harus dilakukan oleh Account Officer (AO). Dalam hal ini pelaksanaan Inspeksi On The Spot atau kunjungan langsung ke tempat usaha / tinggal debitur hanya dilakukan sesekali dan tidak teratur. Dalam prakteknya sebagian besar kunjungan ke tempat debitur hanya dilakukan apabila terdapat tunggakan kredit modal kerja terhadap debitur yang bersangkutan. Inspeksi On The Spot sebaiknya dilakukan sedikitnya satu bulan sekali dan tanggal kunjungan berganti – ganti tiap bulan. Dengan pelaksanaan kunjungan yang berpola seperti ini maka bank akan mendapatkan

informasi terbaru mengenai usaha nasabah dan keadaan usaha nasabah sehingga apabila terdapat masalah tunggakan kredit bank dapat mengambil tindakan pembinaan lebih awal.

b. Pembinaan terhadap nasabah

Pembinaan terhadap nasabah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan oleh pihak bank guna memberikan pembinaan kepada debitur yang mendapatkan kredit modal kerja dari bank. Sejauh ini pembinaan terhadap nasabah hanya dilakukan saat nasabah mulai mengalami masalah dalam pengembalian kredit, yaitu saat nasabah mulai membuat tunggakan dalam kredit yang ditanggungnya. Pembinaan terhadap debitur hendaknya dilakukan lebih awal dan terprogram. Seharusnya pembinaan terhadap debitur dilakukan sejak awal pemberian kredit sehingga apabila debitur mulai menunjukkan kesulitan dalam mengembalikan angsuran kreditnya maka pihak bank dapat segera mengetahui dan melakukan pembinaan terhadap nasabah tersebut dan juga memberikan saran – saran atau masukan – masukan terhadap usaha debitur sehingga usaha mereka dapat lebih maju dan memperlancar pengembalian kredit nasabah tersebut.

c. *Account Officer* (AO)

Account Officer memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemberian kredit karena *Account Officer* (AO) merupakan petugas bank yang melakukan kunjungan ke tempat nasabah dan memberikan penilaian

terhadap layak atau tidaknya debitur tersebut menerima kredit. Pemilihan *Account Officer* yang baik dan kompeten dalam melayani nasabah sangat diperlukan, karena *Account Officer* sendiri memiliki peran yang dominan pada saat debitur melakukan pengajuan kredit, pencairan kredit, serta saat pelunasan kredit, *Account Officer* selalu terlibat di dalamnya yaitu membina dan mengawasi debitur – debitur yang menerima kredit.

Perlunya dilakukan penambahan jumlah *Account Officer* karena tidak sebanding dengan banyaknya debitur yang ditangani setiap tahun, agar proses perkreditan berjalan lebih lancar dan efisien.

Account Officer hendaknya juga lebih sering melakukan pembinaan terhadap debitur – debitur yang dibinanya sehingga apabila debitur mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya, maka *Account Officer* dapat segera mencari solusi yang baik.

2. Analisis Tunggakan Kredit Modal Kerja

Tunggakan kredit atau Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari bank tersebut. Batas Non Performing Loan (NPL) yang ditetapkan bank Indonesia adalah 5%. Penghitungan tunggakan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang dilakukan selama 3 periode yaitu tahun 2010,2011, dan 2012. Berikut adalah data tunggakan kredit modal

kerja dan data kredit yang disalurkan serta perhitungan presentase tunggakan kredit.

Tabel 7 **Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja dan Kredit Modal Kerja yang Disalurkan Tahun 2010 s/d Tahun 2012**

Tahun	Total Tunggakan Kredit		Total Kredit Modal Kerja	
	Jumlah debitur	Jumlah	Jumlah debitur	Jumlah
2010	170	482.502.000	1590	16.838.502.000
2011	220	552.617.500	1820	18.097.617.500
2012	250	693.866.375	1979	19.167.356.000

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Tanjungrejo Kota Malang

Perhitungan Presentase tunggakan kredit modal kerja yang disalurkan selama 3 periode yaitu tahun 2010 – 2012 adalah sebagai berikut :

- a. NPL tahun 2010 =
= 2,86 %
- b. NPL tahun 2011 =
= 3,05 %

$$\begin{aligned}
 \text{c. NPL tahun 2012} &= \\
 &= 3,75\%
 \end{aligned}$$

Tabel 7 merupakan tabel yang menunjukkan besarnya NPL yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang selama 3 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan keterangan yang terdapat di tabel 7 dapat dilihat bahwa NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 terdapat NPL sebesar 2,86% kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,05% dan pada tahun 2012 meningkat cukup tinggi menjadi sebesar 3,75%.

Tabel 8 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja periode yang berakhir pada 31 Desember 2010

No	Jenis Kredit	Total Tunggakan KMK	Jumlah KMK Disalurkan
		Jumlah	Jumlah
1	Pertanian	160.559.000	16.838.502.000
2	Perdagangan	251.250.000	16.838.502.000
3	Jasa Dunia Usaha	70.693.000	16.838.502.000

Perhitungan presentase tunggakan kredit yang berakhir pada periode 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{a.} & \qquad \qquad \qquad \text{NPL Kredit Pertanian} = \frac{\quad}{\quad} \times 100 \\
 & \qquad \qquad \qquad \%
 \end{aligned}$$



$$= 0,95 \%$$

b.
$$\text{NPL Kredit Perdagangan} = \frac{\text{NPL Kredit Perdagangan}}{\text{Total Kredit Perdagangan}} \times 100 \%$$

$$= 1,492 \%$$

c.
$$\text{NPL Kredit Jasa Dunia Usaha} = \frac{\text{NPL Kredit Jasa Dunia Usaha}}{\text{Total Kredit Jasa Dunia Usaha}} \times 100\%$$

$$= 0,419\%$$

Tabel 8 merupakan data tentang tunggakan kredit (NPL) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan pada tahun 2011. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan terbagi menjadi 3 yaitu kredit pertanian, kredit perdagangan, dan kredit jasa dunia usaha. Pada tahun 2010 NPL kredit modal kerja adalah 2,86 % yang terdiri dari NPL kredit pertanian sebesar 0,95% kemudian NPL kredit perdagangan sebesar 1,492% dilanjutkan dengan NPL kredit jasa dunia usaha sebesar 0,419%.

Tabel 9 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja Periode yang berakhir pada 31 Desember 2011

No	Jenis Kredit	Total Tunggakan KMK	Jumlah KMK Disalurkan
		Jumlah	Jumlah
1	Pertanian	196.286.500	18.097.617.500
2	Perdagangan	321.029.500	18.097.617.500
3	Jasa Dunia Usaha	100.184.000	18.097.617.500

Sumber : Data Diolah

Perhitungan prosentase tunggakan kredit yang berakhir pada periode 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{a. NPL Kredit Pertanian} &= \frac{\text{NPL Kredit Pertanian}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \% \\
 &= 1,084 \% \\
 \text{b. NPL Kredit Perdagangan} &= \frac{\text{NPL Kredit Perdagangan}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \% \\
 &= 1,773 \% \\
 \text{c. NPL Kredit Dunia Usaha} &= \frac{\text{NPL Kredit Dunia Usaha}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \% \\
 &= 0,553 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 9 merupakan data tentang tunggakan kredit (NPL) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan pada tahun 2011. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan terbagi menjadi 3 yaitu kredit pertanian, kredit perdagangan, dan kredit jasa dunia usaha. Pada tahun 2011 NPL kredit modal kerja adalah 3,05% yang terdiri dari NPL kredit pertanian sebesar 1,084% kemudian NPL kredit perdagangan sebesar 1,773% dilanjutkan dengan NPL kredit jasa dunia usaha sebesar 0,553%.

Tabel 10 Laporan Tunggakan Kredit Modal Kerja

No	Jenis Kredit	Total Tunggakan KMK	Jumlah KMK Disalurkan
		Jumlah	Jumlah
1	Pertanian	209.500.500	18.500.450.000
2	Perdagangan	328.472.500	18.500.450.000

3	Jasa Dunia Usaha	155.893.375	18.500.450.000
---	------------------	-------------	----------------

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2012

Sumber : Data Diolah

Perhitungan prosentase tunggakan kredit modal kerja yang berakhir pada periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{a. NPL Kredit Pertanian} &= \frac{\text{NPL Kredit Pertanian}}{\text{Total Kredit Modal Kerja}} \times 100 \% \\
 &= 1,132 \% \\
 \text{b. NPL Kredit Perdagangan} &= \frac{\text{NPL Kredit Perdagangan}}{\text{Total Kredit Modal Kerja}} \times 100 \% \\
 &= 1,775 \% \\
 \text{c. NPL Kredit Jasa Dunia Usaha} &= \frac{\text{NPL Kredit Jasa Dunia Usaha}}{\text{Total Kredit Modal Kerja}} \times 100 \% \\
 &= 0,842 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 10 merupakan data tentang tunggakan kredit (NPL) berdasarkan jenis kredit yang disalurkan pada tahun 2012. Jenis kredit modal kerja yang disalurkan terbagi menjadi 3 yaitu kredit pertanian, kredit perdagangan, dan kredit jasa dunia usaha. Pada tahun 2010 NPL kredit modal kerja adalah 3,75 % yang terdiri dari

NPL kredit pertanian sebesar 1,132% kemudian NPL kredit perdagangan sebesar 1,775% dilanjutkan dengan NPL kredit jasa dunia usaha sebesar 0,842%.

Berdasarkan dari data – data yang telah tersaji diatas , dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan bahwa kredit yang disalurkan di tiap jenis kredit modal kerja seperti kredit pertanian, kredit perdagangan, dan kredit usaha menunjukkan peningkatan. Rincian perhitungan presentase jumlah tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Perbandingan Persentase Kredit Modal Kerja (KMK) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012

No	Jenis Kredit	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Kredit Pertanian	0,95%	1,08%	1,09%
2	Kredit Perdagangan	1,49%	1,77%	1,92%
3	Kredit Jasa Dunia Usaha	0,42%	0,55%	0,60%
	Jumlah	2,86%	3,41%	3,62%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel 11 yang merupakan tabel perbandingan presentase tunggakan kredit dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan tunggakan kredit

semakin meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan peningkatan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2010 dimana tunggakan kredit sebesar 2,86 % dari jumlah kredit modal kerja yang disalurkan. Kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan tunggakan kredit modal kerja sebanyak 0,55 % sehingga tunggakan kredit modal kerja di tahun 2011 menjadi 3,41 %. Pada tahun 2012 kembali terjadi peningkatan tunggakan kredit modal kerja sebesar 0,34 % sehingga pada tahun 2012 tunggakan kredit modal kerja meningkat menjadi 3,75 %.

Pada tahun 2010 presentase tunggakan kredit adalah 2,86 % yang berasal dari kredit pertanian, kredit perdagangan, dan kredit jasa dunia usaha. Kredit perdagangan merupakan kredit dengan jumlah tunggakan tertinggi yaitu sebesar 1,49 % disusul kemudian kredit pertanian sebesar 0,95 % dan kredit jasa dunia usaha merupakan kredit dengan tunggakan terendah yaitu sebesar 0,42 %.

Pada tahun 2011 presentase tunggakan kredit meningkat 0,55 % menjadi 3,41 %. Tunggakan kredit tertinggi terdapat di kredit perdagangan yaitu 1,77 % meningkat sebesar 0,28% dari tahun 2010. Kemudian pada kredit pertanian terdapat tunggakan kredit sebesar 1,08 % , meningkat sebesar 0,13 % dari tahun 2010. Selanjutnya adalah kredit jasa dunia usaha dengan tunggakan kredit sebesar 0,55%, meningkat sebesar 0,13 % dari tahun 2010.

Pada tahun 2012 presentase tunggakan kredit kembali meningkat menjadi 3,62% atau meningkat sebesar 0,21 % dari tahun 2011. Kredit perdagangan memiliki tunggakan kredit tertinggi sebesar 1,92% atau meningkat sebesar 0,15% dari tahun 2011. Kemudian kredit pertanian terdapat tunggakan kredit sebesar

1,09 % terdapat peningkatan akan tetapi hanya sebesar 0,1 % . Selanjutnya adalah kredit jas adunia usaha yang terdapat tunggakan kredit sebesar 0,60%, terdapat peningkatan sebesar 0,10% dar i tahun 2011.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan tunggakan kredit tertinggi terjadi pada periode 2011 yaitu terjadi peningkatan tunggakan kredit modal kerja sebesar 0,55% dari 2,86% menjadi 3,41%. Kemudian jenis kredit modal kerja yang memiliki tunggakan kredit tertinggi adalah kredit perdagangan dimana kredit jenis ini mengalami peningkatan jumlah tunggakan kredit yang terus meningkat selama 3 periode yaitu di tahun 2010 sebesar 1,49% kemudian di tahun 2011 sebesar 1,77% dan di tahun 2012 sebesar 1,92%.

Data – data diatas memperlihatkan bahwa pengawasan kredit terhadap kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang dalam pelaksanaannya di lapangan belum dilaksanakan secara maksimal karena tunggakan kredit modal kerja masi tergolong tinggi walaupun di bawah standard NPL (Non Performing Loan) yang diperbolehkan Bank Indonesia sebesar 5%, namun kecenderungan tunggakan kredit modal kerja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.Walaupun pada dasarnya tunggakan kredit merupakan salah satu resiko dari bank saat memberikan kredit, namun bank harus tetap mengelolanya agar tidak terlalu membebani kesehatan bank tersebut dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Unit Tanjungrejo.

Faktor – Faktor penyebab tunggakan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Dari sisi Debitur, antara lain :

- 1) Itikad tidak baik dari debitur misalnya debitur yang sengaja tidak membayar cicilan kredit yang dibebankan kepadanya sehingga terjadi tunggakan kredit dapat diantisipasi dengan memperketat prosedur pemberian kredit.
- 2) Menurunnya usaha debitur sehingga kemampuannya dalam membayar angsuran turut berkurang misalnya usaha yang merupakan mata pencaharian utama debitur mengalami penurunan omset ataupun mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada / kurangnya pemasukan untuk membayar tunggakan kredit, dapat diatasi dengan cara memberikan tambahan jatuh tempo tunggakan kredit atau memberikan tambahan kredit modal kerja sehingga debitur dapat membangun lagi usahanya.
- 3) Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik yaitu debitur dalam melakukan pengelolaan usaha tidak berjalan dengan baik / kurang terarah sehingga usaha yang dikembangkan mengalami kemunduran dan berdampak pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh dan kemampuan dalam membayar tunggakan kredit, dalam hal ini na
- 4) Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula misalnya pada saat pengajuan kredit untuk kepentingan usaha namun pada prakteknya debitur menggunakan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif misalnya membeli kendaraan pribadi sehingga penggunaan kredit yang tidak tepat sasaran ini

mengakibatkan debitur kesulitan mengangsur tunggakan kredit dikarenakan pemasukan berkurang.

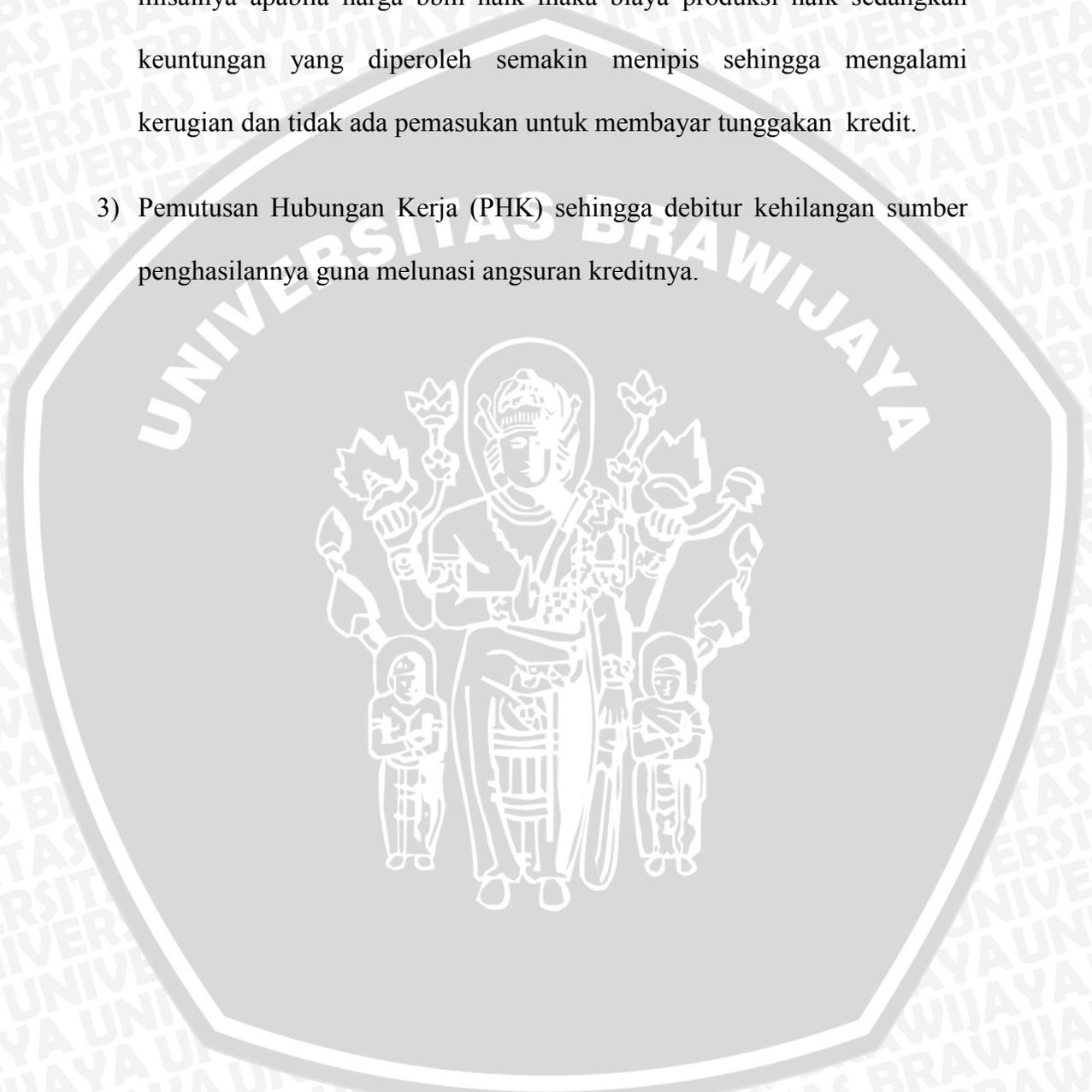
b. Sisi Intern BRI Unit :

- 1) Itikad tidak baik dari petugas BRI misalnya adanya kerjasama antara debitur dan petugas BRI agar kredit yang diajukan tetap diapprove walaupun sebenarnya debitur tersebut tidak layak menerima kredit tersebut dan sebagai imbalannya petugas BRI tersebut mendapatkan sejumlah fee.
- 2) Kekurangmampuan petugas BRI Unit dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan kredit misalnya kurang jeli dalam menyimpulkan hasil survei ke tempat debitur sehingga hasil survei kurang tepat.
- 3) Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur misalnya pembinaan dan kunjungan terhadap debitur yang bermasalah hanya dilakukan sesekali sehingga debitur yang menunggak kredit dapat bertambah banyak.

c. Sisi Ekstern BRI Unit antara lain :

- 1) Keadaan Force majeure seperti bencana alam, kebakaran, perang yang berkepanjangan, kerusuhan politik yang mengakibatkan usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya membayar tunggakan kredit.

- 2) Perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya – biaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap usaha yang digeluti debitur, misalnya apabila harga bbm naik maka biaya produksi naik sedangkan keuntungan yang diperoleh semakin menipis sehingga mengalami kerugian dan tidak ada pemasukan untuk membayar tunggakan kredit.
- 3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga debitur kehilangan sumber penghasilannya guna melunasi angsuran kreditnya.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang, maka kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang dilakukan mulai dari proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan mengandung unsur pengawasan ganda (melibatkan dua pejabat berbeda fungsi) dan pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan) guna memperkecil resiko tunggakan kredit.
2. Kredit Modal Kerja yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang digolongkan menjadi 5 kategori kolektabilitas yaitu Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Dalam Pengawasan Khusus (DPK), Diragukan (D), Macet (M). Kategori kolektabilitas yang tergolong dalam tunggakan kredit adalah kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), serta Macet (M).
3. Presentase tunggakan kredit modal kerja yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang selama

3 periode yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,86 %, kemudian di tahun 2011 3,41%, selanjutnya di tahun 2012 3,62%. Peningkatan tunggakan kredit modal kerja terjadi setiap tahun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana tunggakan kredit modal kerja meningkat sebesar 0,55% dari 2,86% menjadi 3,41 %. Sedangkan jenis kredit modal kerja yang memiliki jumlah tunggakan kredit tertinggi adalah kredit perdagangan.

4. Pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang telah berjalan dengan baik dan pada dasarnya telah sesuai dengan teknik pengawasan yang umumnya digunakan untuk memperkecil tunggakan kredit. Hal ini dapat dilihat dari NPL BRI dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5 % yaitu pada tahun 2,86% pada tahun 2010, 3,41% pada tahun 2011, dan 3,62% pada tahun 2012. Namun diharapkan bahwa jumlah NPL dapat diturunkan dari tahun ke tahun mengingat jumlah NPL terus naik dari tahun ke tahun meskipun masih dibawah batas normal.
5. Kegagalan debitur dalam mengelola usaha perdagangan dan pertanian seperti usaha yang mengalami kebangkrutan , kegagalan panen, serta kurang cakap dalam mengelola kredit yang diberikan merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya tunggakan dari kredit yang telah disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang.

B. Saran

1. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang hendaknya lebih ditingkatkan terutama frekuensi kunjungan yang dilakukan ke debitur. Frekuensi kunjungan kepada debitur hendaknya dilakukan dua kali dalam satu bulan guna mempererat komunikasi antara pihak bank dengan debitur agar apabila debitur mengalami masalah yang berkaitan dengan kredit maka dapat segera diketahui dan mendapatkan solusi.
2. Penambahan tenaga di bagian *Account Officer* (AO) yang didukung oleh ketrampilan yang kompeten, sehingga dapat melakukan pelayanan seperti inspeksi on the spot dan kunjungan terhadap debitur dengan maksimal.